



# **RENCANA KERJA**

## **BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**

**TAHUN  
2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**  
Jl. dr. Soetomo no.1 Slawi, telp. (0283) 491116, fax. (0283) 491289  
Website : [bkd.tegalkab.go.id](http://bkd.tegalkab.go.id); email: [bkd@tegalkab.go.id](mailto:bkd@tegalkab.go.id)



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 perlu disusun rencana kerja tahunan Perangkat Daerah;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
  - c. bahwa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 telah dilakukan verifikasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 146);
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019-2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 43 Tahun 2021).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 2019 sampai dengan tahun 2024;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Renja PD menjadi pedoman rencana kerja dan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan.

## BAB II

### RENJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. RSUD dr. Soeselo;
  - d. RSUD Suradadi;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum;

- f. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
- r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- s. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
- t. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- u. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- w. Sekretariat Daerah;
- x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.
- cc. Inspektorat;
- dd. Kecamatan Adiwerna;
- ee. Kecamatan Balapulang;
- ff. Kecamatan Bojong;
- gg. Kecamatan Bumijawa;
- hh. Kecamatan Dukuhturi;
- ii. Kecamatan Dukuhwaru;
- jj. Kecamatan Jatinegara;
- kk. Kecamatan Kedungbanteng;
- ll. Kecamatan Kramat;
- mm. Kecamatan Lebaksiu;



- nn. Kecamatan Margasari;
- oo. Kecamatan Pagerbarang;
- pp. Kecamatan Pangkah;
- qq. Kecamatan Slawi;
- rr. Kecamatan Suradadi;
- ss. Kecamatan Tarub;
- tt. Kecamatan Talang;
- uu. Kecamatan Warureja;
- vv. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

(2) Isi dan uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 1 Oktober 2021 (02)

BUPATI TEGAL

  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 1 Oktober 2021 (02)

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

  
WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 60

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia dan Ridha-Nya dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKD) Kabupaten Tegal Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Renja BKD Kabupaten Tegal Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan satu tahunan yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Tegal pada tahun anggaran 2022 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BKD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.

Kami menyadari bahwa lingkungan strategis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tegal akan selalu berkembang secara dinamis. Oleh karena itu masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pemangku kepentingan sangat kami harapkan, sehingga Renja ini dapat secara efektif menjadi medium bagi peningkatan kinerja pembangunan kepegawaian dan pewujudan pemerintahan yang baik di Kabupaten Tegal.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja BKD Kabupaten Tegal Tahun 2022 ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap usaha kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Slawi,        September 2021

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**

**SEKRETARIS**



**MUJAHIDIN, SH, MH**

*Pembina Tingkat I*

NIP. 19690619 199003 1 003

## DAFTAR ISI

Halaman

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Surat Penetapan Rencana Kerja BKD Kab. Tegal Tahun 2023 .....</b>                                     |           |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>ii</b> |
| <br>   |           |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....  | 1         |
| 1.2. Landasan Hukum .....  | 2         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....   | 4         |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....   | 4         |
| <br>   |           |
| <b>BAB II     EVALUASI PELAKSAAAN RENCANA KERJA BKD KABUPATEN<br/>TEGAL TRIWULAN II TAHUN 2020 .....</b> | <b>7</b>  |
| 2.1. Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun Lalu .....   | 7         |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....   | 20        |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi<br>Perangkat Daerah .....                          | 22        |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....   | 23        |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....   | 41        |
| <br>   |           |
| <b>BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BKD<br/>KABUPATEN TEGAL .....</b>                    | <b>42</b> |
| 3.1. Telaahan, terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....  | 42        |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....   | 43        |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....  | 43        |
| <br>   |           |
| <b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                                      | <b>47</b> |
| 4.1. Rencana Kerja .....   | 47        |
| 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah .....  | 59        |
| <br>   |           |
| <b>BAB V     PENUTUP .....</b>   | <b>63</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa SKPD menyusun Renja-SKPD yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa proses penyusunan Rencana Kerja OPD terdiri dari tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Dalam tataran implementasi amanat tersebut, telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal. Hal ini merupakan kewajiban bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Renja BKD) Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan BKD Kabupaten

Tegal untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan/subkegiatan, lokasi, kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BKD Kabupaten Tegal yang disusun berpedoman kepada Renstra BKD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2022. Renja BKD Kabupaten Tegal merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yaitu terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia". Selain itu sebagai landasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam Penyusunan Renja antara lain: (1) program kerja dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi BKD sebagai pengelola kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. (2) adanya kesesuaian antara program kerja dan kegiatan yang direncanakan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. (3) program kerja dan kegiatan yang direncanakan dirumuskan secara jelas dan terukur *output* dan *outcome*-nya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dikelola berdasarkan prestasi kerja. dan (4) adanya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun sebelumnya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renja BKD Kabupaten Tegal Tahun 2022 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka (RPJP) Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022;

16. Surat Edaran Bupati Tegal Nomor 050/0109.B tanggal 27 Januari 2021 tentang Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2022 sebagai Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja BKD Kabupaten Tegal tahun 2022 sebagai dokumen resmi perencanaan daerah mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BKD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 periode tahun Ketiga 2022;
2. Sebagai arah bagi pelaksanaan kegiatan dan pembangunan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tegal pada tahun 2022;
3. Sebagai pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pembangunan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tegal pada tahun 2022;
4. Sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tegal pada tahun 2022;
5. Sebagai landasan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada tahun 2022;
6. Sebagai arah bagi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di BKD Kabupaten Tegal pada tahun 2022.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BKD Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

#### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKD KABUPATEN TEGAL TAHUN LALU

##### 2.1. Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dalam asumsi satu periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja utama perangkat daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi; dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah; tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.



### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai rencana kerja perangkat daerah meliputi indicator kinerja dan target yang hendak dicapai pada tahun 2022, serta sumber pendanaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut.

## BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKD KABUPATEN TEGAL TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun Lalu

Seesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka evaluasi capaian pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dalam periode rencana strategis tahun 2019-2024 yang merupakan tahun pertama periode Rencana Strategis 2019-2024, sedangkan Renja tahun 2022 berada dalam periode ketiga Renstra tahun 2019-2024. Adapun Realisasi keuangan dan kegiatan tahun 2020 yang merupakan tahun pertama periode renstra 2019-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.1**  
**Rekapitulasi Realisasi Keuangan**  
**Tahun Anggaran 2020**

| No. | Program dan Kegiatan  | Pagu Anggaran        | Realisasi            | Persentase Realisasi |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| I.  | <b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan Perencanaan Perangkat Daerah</b> | <b>1.263.440.000</b> | <b>1.202.387.257</b> | <b>95,17 %</b>       |
| 1.  | Penyediaan Jasa Kantor  | 485.000.000          | 456.009.249          | 94,02 %              |
| 2.  | Rapat Koordinasi dan Konsultasi   | 109.500.000          | 96.366.828           | 88,01 %              |
| 3.  | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor  | 329.500.000          | 323.722.980          | 98,25 %              |
| 4.  | Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja   | 49.000.000           | 43.848.900           | 89,49 %              |
| 5.  | Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah  | 50.000.000           | 49.999.300           | 100,00 %             |
| 6.  | Pengadaan Sarana Prasarana Kantor   | 240.440.000          | 232.440.000          | 96,67 %              |
| II. | <b>Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN</b>   | <b>1.360.086.000</b> | <b>1.250.427.588</b> | <b>91,94 %</b>       |
| 7.  | Penilaian Kompetensi ASN  | 268.865.000          | 236.041.131          | 87,79 %              |

| No.         | Program dan Kegiatan   | Pagu Anggaran        | Realisasi            | Persentase Realisasi |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8.          | Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi                                  | 1.041.626.000        | 966.454.461          | 92,78 %              |
| 9.          | Pengembangan Karir Jabatan Fungsional  | 49.595.000           | 47.931.996           | 96,65 %              |
| <b>III.</b> | <b>Program Mutasi dan Pengelolaan Data ASN</b>   | <b>2.981.015.000</b> | <b>2.680.222.455</b> | <b>89,91 %</b>       |
| 10.         | Pengelolaan Data dan Sistem Layanan Kepegawaian  | 554.670.000          | 551.460.802          | 99,42 %              |
| 11.         | Pengadaan/Pemeliharaan Pengelolaan Data dan SIM Kepegawaian                                  | 50.640.000           | 50.552.500           | 99,83 %              |
| 12.         | Penataan Administrasi Formasi, Pengadaan dan Kepangkatan ASN                                 | 2.319.080.000        | 2.023.193.203        | 87,24 %              |
| 13.         | Penataan Peminanaan dan Pemberhentian ASN  | 146.500.000          | 55.015.950           | 97,16 %              |
| <b>IV.</b>  | <b>Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN</b>   | <b>269.416.000</b>   | <b>244.990.389</b>   | <b>90,93 %</b>       |
| 14.         | Pembinaan ASN  | 98.164.000           | 79.241.400           | 80,72 %              |
| 15.         | Pemberiaan Penghargaan dan Kesejahteraan ASN   | 171.252.000          | 165.748.989          | 96,79 %              |
| <b>V.</b>   | <b>Program Pendidikan dan Pelatihan ASN</b>  | <b>407.102.000</b>   | <b>305.457.300</b>   | <b>75,03 %</b>       |
| 16.         | Pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan dan pelatihan Penjurangan ASN           | 254.511.000          | 240.429.800          | 94,47 %              |
| 17.         | Pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional ASN | 152.591.000          | 65.027.500           | 42,62 %              |
|             |  | <b>6.281.059.000</b> | <b>5.683.484.989</b> | <b>90,49 %</b>       |

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi keuangan tahun 2020 adalah sejumlah Rp 5.683.484.989,- dari pagu anggaran Rp 6.281.059.000,- atau dengan capaian 90,49 %. dengan adanya pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan rasionalisasi program dan kegiatan tahun 2020 yang difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 serta dampak yang muncul dari pandemi ini. Oleh karena itu pagu anggaran tahun 2020 mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pagu pada saat penetapan APBD tahun 2020 yaitu sebesar Rp 11.965.752.000.

Adapun evaluasi kinerja program dan kegiatan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.2 (Tabel T-C.29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020**  
**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan | target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024              | Realisasi target Kinerja Capaian Program & Kegiatan s/d Thn 2019 (n-3)          | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)                    |                                     |                       | Target Program & Kegiatan (Renja PD tahun 2021 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d tahun berjalan (2021) |                                      |        |       |       |       |
|------|---|--|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
|      |   |  |   |   | Target Renja Tahun 2020 (n-2)   | Realisasi Renja PD Tahun 2020 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun brjln (n-1)                   | Tingkat Realisasi Target Renstra (%) |        |       |       |       |
| 1    | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                                   | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                            |        |       |       |       |
| 5    |   | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>           |   |   |   |                                     |                       |  |  |                                      |        |       |       |       |
| 5    | 03  | <b>KEPEGAWAIAN</b>                                   |   |   |   |                                     |                       |  |  |                                      |        |       |       |       |
| 5    | 03  | 01   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b> | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKD | 100 persen  | 0,00                                | 100,00                | 100,00   | 100,00   | 100,00                               |        |       |       |       |
| 5    | 03  | 01   | 2,01  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang tersedia                    | 100 persen                          | 0                     | 20,00  | 20,00  | 100,00                               | 20,00  | 40,00 | 40,00 |       |
| 5    | 03  | 01   | 2,01  | 01  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | jumlah dokuen RTP SPIP              | 25 dok.               | 0  | 5  | 5                                    | 100,00 | 5     | 10    | 40,00 |
|      |   |  |   |   | jumlah dokumen renstra/ perubahan renstra   | 10 dok.                             | 0                     | 0  | 0  | #DIV/0!                              | 5      | 5     | 5     | 50,00 |
|      |   |  |   |   | jumlah dokumen renja/perubahan renja  | 25 dok.                             | 0                     | 5  | 5  | 100,00                               | 5      | 10    | 10    | 40,00 |
|      |   |  |   |   | jumlah dokumen renja RB   | 25 dok.                             | 0                     | 5  | 5  | 100,00                               | 5      | 10    | 10    | 40,00 |
| 5    | 03  | 01   | 2,01  | 06  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | jumlah dokumen pelaporan kinerja    | 40 jenis              | 0  | 8  | 8                                    | 100,00 | 8     | 16    | 40,00 |

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan  | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan   | target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024 | Realisasi target Kinerja Capaian Program & Kegiatan s/d Thn 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program & Kegiatan (Renja PD tahun 2021 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d tahun berjalan (2021) |                                      |
|-----------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--------------------------------------|
|                 |  |  |  |  | Target Renja Tahun 2020 (n-2)                                      | Realisasi Renja PD Tahun 2020 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun brjln (n-1)                   | Tingkat Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                            |
| 5 03 01 2,02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    | <b>persentase pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan</b>           | <b>100 persen</b>                                      | <b>0</b>   | <b>20</b>  | <b>20</b>                           | <b>100,00</b>         | <b>20,00</b>   | <b>40,00</b>   | <b>40,00</b>                         |
| 5 03 01 2,02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | gaji dan tunjangan ASN yang disediakan   | 70 bln   | 0  | 14   | 14                                  | 100,00                | 14   | 28   | 40,00                                |
| 5 03 01 2,02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan<br>jumlah pelaporan keuangan yang dibuat | 60 bln<br>15 jenis                                     | 0<br>0   | 12<br>3  | 12<br>3                             | 100,00<br>100,00      | 12<br>3  | 24<br>6  | 40,00<br>40,00                       |
| 5 03 01 2,05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>persentase ASN BKD yang mengikuti pelatihan/ bimtek</b>                                     | <b>100 persen</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>#DIV/0!</b>        | <b>20,00</b>   | <b>20,00</b>   | <b>20,00</b>                         |
| 5 03 01 2,05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | jumlah ASN BKD yang mengikuti pelatihan/bimtek   | 275 ASN  | 0  | 0  | 0                                   | #DIV/0!               | 55   | 55   | 20,00                                |
| 5 03 01 2,06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>persentase sarana administrasi umum yang tersedia</b>                                       | <b>100 persen</b>                                      | <b>0</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>                       | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>                        |
| 5 03 01 2,06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah penerangan bangunan kantor  | 50 jenis   | 0  | 9  | 10                                  | 111,11                | 9  | 19   | 38,00                                |
| 5 03 01 2,06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | jumlah ATK TIK yang dibeli<br>jumlah ATK yang dibeli   | 45 jenis<br>270 jenis                                  | 0<br>0   | 9<br>50  | 9<br>54                             | 100,00<br>108,00      | 9<br>54  | 18<br>108  | 40,00<br>40,00                       |
| 5 03 01 2,06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan                                | 55 bln   | 0  | 11   | 11                                  | 100,00                | 11   | 22   | 40,00                                |

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan         | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan        | target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024 | Realisasi target Kinerja Capaian Program & Kegiatan s/d Thn 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program & Kegiatan (Renja PD tahun 2021 (n-1)) | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d tahun berjalan (2021) |                                      |
|-----------------|---|---|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--------------------------------------|
|                 |   |   |  |  | Target Renja Tahun 2020 (n-2)                                      | Realisasi Renja PD Tahun 2020 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun brjln (n-1)                   | Tingkat Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                            |
| 5 03 01 2,06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | jumlah barang cetakan                                       | 40 jenis   | 0  | 13   | 13                                  | 100,00                | 13  | 26   | 65,00                                |
| 5 03 01 2,06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | penyediaan bahan bacaan                                     | 14400 eks  | 0  | 2620   | 2620                                | 100,00                | 2880  | 5500   | 38,19                                |
| 5 03 01 2,06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi | 55 bulan   | 0  | 11   | 11                                  | 100,00                | 11  | 22   | 40,00                                |
|                 |   | jumlah rapat koordinasi bidang kepegawaian                  | 5 keg.   | 0  | 0  | 0                                   | #DIV/0!               | 1   | 1  | 20,00                                |
| 5 03 01 2,07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>persentase barang milik daerah yang tersedia</b>         | <b>100 persen</b>                                      | <b>0</b>   | <b>75,19</b>   | <b>75,19</b>                        | <b>100,00</b>         | <b>84,66</b>  | <b>84,66</b>   | <b>84,66</b>                         |
| 5 03 01 2,07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Mobil Dinas Operasional                                     | 4 unit   | 0  | 1  | 1                                   | 100,00                | 0   | 1  | 25,00                                |
|                 |   | Sepeda Motor Dinas Operasional                              | 5 unit   | 0  | 0  | 0                                   | #DIV/0!               | 0   | 0  | 0,00                                 |
| 5 03 01 2,07 05 | Pengadaan Mebel   | almari arsip besi   | 1 buah   | 0  | 0  | 0                                   | #DIV/0!               | 1   | 1  | 100,00                               |
|                 |   | almari kaca arsip   | 1 buah   | 0  | 0  | 0                                   | #DIV/0!               | 0   | 0  | 0,00                                 |
|                 |   | rak besi  | 7 buah   | 0  | 0  | 0                                   | #DIV/0!               | 5   | 5  | 71,43                                |
|                 |   | kursi kerja   | 15 buah  | 0  | 0  | 0                                   | #DIV/0!               | 5   | 5  | 33,33                                |
|                 |   | meja kerja  | 5 buah   | 0  | 0  | 0                                   | #DIV/0!               | 5   | 5  | 100,00                               |
|                 |   | meja pelantikan   | 1 buah   | 0  | 0  | 0                                   | #DIV/0!               | 0   | 0  | 0,00                                 |
| 5 03 01 2,07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | AC  | 16 buah  | 0  | 0  | 0                                   | #DIV/0!               | 1   | 1  | 6,25                                 |
|                 |   | CCTV  | 3 paket  | 0  | 0  | 0                                   | #DIV/0!               | 1   | 1  | 33,33                                |
|                 |   | Conference cam webcam                                       | 2 buah   | 0  | 0  | 0                                   | #DIV/0!               | 1   | 1  | 50,00                                |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan | target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024 | Realisasi target Kinerja Capaian Program & Kegiatan s/d Thn 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)   |   |                       | Target Program & Kegiatan (Renja PD tahun 2021 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d tahun berjalan (2021) |                                      |               |              |              |              |
|------|---|--|--|--|--|---|-----------------------|--|--|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|      |   |  |  |  | Target Renja Tahun 2020 (n-2)  | Realisasi Renja PD Tahun 2020 (n-2)                   | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun brjln (n-1)                   | Tingkat Realisasi Target Renstra (%) |               |              |              |              |
| 1    | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                            |               |              |              |              |
|      |   | CPU/Desktop  | 7 buah   | 0  | 0  | 0   | #DIV/0!               | 2  | 2  | 28,57                                |               |              |              |              |
|      |   | Handycam   | 2 buah   | 0  | 0  | 0   | #DIV/0!               | 2  | 2  | 100,00                               |               |              |              |              |
|      |   | Laptop   | 15 buah  | 0  | 0  | 0   | #DIV/0!               | 10   | 10   | 66,67                                |               |              |              |              |
|      |   | LCD projector  | 4 buah   | 0  | 0  | 0   | #DIV/0!               | 3  | 3  | 75,00                                |               |              |              |              |
|      |   | LED TV 55"   | 1 buah   | 0  | 0  | 0   | #DIV/0!               | 1  | 1  | 100,00                               |               |              |              |              |
|      |   | Mesin penghancur kertas                              | 2 buah   | 0  | 0  | 0   | #DIV/0!               | 2  | 2  | 100,00                               |               |              |              |              |
|      |   | Perekam suara digital                                | 5 buah   | 0  | 0  | 0   | #DIV/0!               | 5  | 5  | 100,00                               |               |              |              |              |
|      |   | Printer  | 10 buah  | 0  | 0  | 0   | #DIV/0!               | 6  | 6  | 60,00                                |               |              |              |              |
|      |   | screen projector                                     | 1 buah   | 0  | 0  | 0   | #DIV/0!               | 0  | 0  | 0,00                                 |               |              |              |              |
| 5    | 03  | 01   | 2,08   |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>persentase jasa penunjang urusan yang terbayar</b> | <b>100 persen</b>     | <b>0</b>   | <b>20,00</b>   | <b>20,00</b>                         | <b>100,00</b> | <b>20,00</b> | <b>40,00</b> | <b>40,00</b> |
| 5    | 03  | 01   | 2,08   | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | jasa komunikasi,sumber daya listrik dan air           | 60 bulan              | 0  | 12   | 12                                   | 100,00        | 12           | 24           | 40,00        |
| 5    | 03  | 01   | 2,08   | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | gedung kantor yang bersih dan terpelihara             | 60 bulan              | 0  | 12   | 12                                   | 100,00        | 12           | 24           | 40,00        |
|      |   |  |  |  |  | jumlah pameran pembangunan yang diikuti               | 5 paket               | 0  | 0  | 0                                    | #DIV/0!       | 0            | 0            | 0,00         |
| 5    | 03  | 01   | 2,09   |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>persentase barang milik daerah yang dipelihara</b> | <b>100 persen</b>     | <b>0</b>   | <b>20,00</b>   | <b>20,00</b>                         | <b>100,00</b> | <b>20,00</b> | <b>40,00</b> | <b>40,00</b> |
| 5    | 03  | 01   | 2,09   | 01   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah kendaraan dinas (mobil) yang dipelihara        | 30 unit               | 0  | 6  | 6                                    | 100,00        | 6            | 12           | 40,00        |
|      |   |  |  |  |  | jumlah kendaraan dinas (sepeda motor) yang dipelihara | 55 unit               | 0  | 11   | 11                                   | 100           | 11           | 22           | 40,00        |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan | target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024 | Realisasi target Kinerja Capaian Program & Kegiatan s/d Thn 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) |  |                       | Target Program & Kegiatan (Renja PD tahun 2021 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d tahun berjalan (2021) |                                      |        |        |        |       |
|------|---|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
|      |   |  |  |  | Target Renja Tahun 2020 (n-2)                                      | Realisasi Renja PD Tahun 2020 (n-2)  | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun brjln (n-1)                   | Tingkat Realisasi Target Renstra (%) |        |        |        |       |
| 1    | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                            |        |        |        |       |
| 5    | 03  | 01   | 2,09   | 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                           | AC yang dipelihara   | 95 unit               | 0  | 20   | 19                                   | 95,00  | 10     | 29     | 30,53 |
|      |   |  |  |  |  | CPU/Laptop dipelihara  | 75 unit               | 0  | 15   | 15                                   | 100,00 | 10     | 25     | 33,33 |
|      |   |  |  |  |  | LCD proyektor dipelihara   | 15 unit               | 0  | 3  | 3                                    | 100,00 | 3      | 6      | 40,00 |
|      |   |  |  |  |  | mebelair yang dipelihara   | 50 unit               | 0  | 10   | 10                                   | 100,00 | 25     | 35     | 70,00 |
|      |   |  |  |  |  | printer yang dipelihara  | 55 unit               | 0  | 10   | 11                                   | 110,00 | 10     | 21     | 38,18 |
| 5    | 03  | 01   | 2,09   | 09   | Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya      | jumlah gedung kantor yang dipelihara   | 5 unit                | 0  | 1  | 1                                    | 100,00 | 1      | 2      | 40,00 |
| 5    | 03  | 02   |  |  | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                                  |  |                       |  |  |                                      |        |        |        |       |
|      |   |  |  |  |  | Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan                              | 0,11 persen           | 0,00   | 0,53   | 0,12                                 | 177,36 | 0,12   | 0,12   | 90,91 |
|      |   |  |  |  |  | Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya                               | 96,08 persen          | 0,00   | 87,58  | 87,97                                | 100,45 | 91,50  | 91,50  | 95,23 |
|      |   |  |  |  |  | Persentase jabatan fungsional terisi sesuai dengan kompetensinya                               | 47,88 persen          | 0,00   | 35,44  | 35,76                                | 100,90 | 38,79  | 38,79  | 81,02 |
|      |   |  |  |  |  | Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)   | 318,87 persen         | 0,00   | 110,00   | 110,04                               | 100,04 | 224,96 | 224,96 | 70,55 |
|      |   |  |  |  |  | Rasio pegawai fungsional (%)   | 16,23 persen          | 0,00   | 9,47   | 9,87                                 | 104,22 | 14,40  | 14,40  | 88,72 |
|      |   |  |  |  |  | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan | 93,05 persen          | 0,00   | 92,94  | 93,50                                | 100,60 | 92,94  | 92,94  | 99,88 |



| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                        | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan                                | target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024 | Realisasi target Kinerja Capaian Program & Kegiatan s/d Thn 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program & Kegiatan (Renja PD tahun 2021 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d tahun berjalan (2021) |                                      |
|-----------------|--|---|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--------------------------------------|
|                 |  |   |  |  | Target Renja Tahun 2020 (n-2)                                      | Realisasi Renja PD Tahun 2020 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun brjln (n-1)                   | Tingkat Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                            |
| 5 03 02 2,01    | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                 | persentase formasi CASN terisi  | 100,00 persen  | 0,00%  | 100,00   | 98,75                               | 98,75                 | 100,00   | 100,00   | 100,00                               |
| 5 03 02 2,01 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | jumlah dokumen rencana kebutuhan pegawai  | 25 dok.  | 0  | 5  | 5                                   | 100,00                | 5  | 10   | 40,00                                |
| 5 03 02 2,01 04 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN   | jumlah CASN   | 3000 CASN  | 0  | 499  | 765                                 | 153,31                | 382  | 1147   | 38,23                                |
|                 |  | jumlah CPNS diangkat menjadi PNS  | 1500 CPNS  | 0  | 307  | 276                                 | 89,90                 | 0  | 276  | 18,40                                |
| 5 03 02 2,01 06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                      | jumlah SK pensiun (BUP, APS, janda/duda/anak)                                       | 2835 SK  | 0  | 590  | 665                                 | 112,71                | 581  | 1246   | 43,95                                |
| 5 03 02 2,01 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   | jumlah komputer server baru   | 4 unit   | 0  | 0  | 0                                   | #DIV/0!               | 3  | 3  | 75,00                                |
|                 |  | jumlah pegawai yang dikelola melalui SIMPEG   | 9700 ASN   | 0  | 9700   | 9700                                | 100,00                | 9700   | 9700   | 100,00                               |
|                 |  | jumlah pembangunan/ pengembangan SIM  | 6 buah   | 0  | 1  | 1                                   | 100,00                | 1  | 2  | 33,33                                |
|                 |  | jumlah sistem informasi yang dipelihara   | 12 buah  | 0  | 5  | 6                                   | 120,00                | 6  | 6  | 50,00                                |
| 5 03 02 2,01 11 | Pengelolaan Data Kepegawaian   | dokumen kepegawaian yang dipelihara   | 9700 ASN   | 0  | 9700   | 9700                                | 100,00                | 9700   | 9700   | 100,00                               |
|                 |  | KIP yang dicetak  | 7500 buah  | 0  | 1500   | 1500                                | 100,00                | 900  | 2400   | 32,00                                |
|                 |  | Latomap folder baru   | 5000 buah  | 0  | 940  | 940                                 | 100,00                | 700  | 1640   | 32,80                                |
| 5 03 02 2,02    | Mutasi dan Promosi ASN   | persentase formasi JPT Pratama dan Jabatan Administrator (kepala SKPD/camat) terisi | 100,00 persen  | 0%   | 92,59  | 92,59                               | 100,00                | 96,30  | 96,30  | 96,30                                |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan Program/<br>Kegiatan | Indikator Kinerja program, kegiatan<br>dan Sub Kegiatan                                     | target Kinerja<br>Capaian Program<br>(Renstra PD) tahun<br>2024 | Realisasi<br>target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program &<br>Kegiatan s/d<br>Thn 2019 (n-<br>3) | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun lalu<br>(n-2) |  |                             | Target<br>Program &<br>Kegiatan<br>(Renja PD<br>tahun 2021<br>(n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>target Renstra s/d tahun<br>berjalan (2021) |   |
|---------------------|---|---|---|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
|                     |   |   |   |  | Target<br>Renja<br>Tahun<br>2020 (n-2)                                   | Realisasi<br>Renja PD<br>Tahun<br>2020 (n-2) | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |   | Realisasi<br>Program &<br>Kegiatan s/d<br>tahun brjln (n-1)                | Tingkat<br>Realisasi<br>Target Renstra<br>(%) |
| 1                   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  | 8=(7/6)                     | 9   | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                                     |
| 5 03 02 2,02 01     | Pengelolaan Mutasi ASN  | jumlah PNS Mutasi antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah           | 100 PNS   | 0  | 10   | 5  | 50,00                       | 10  | 15   | 15,00   |
| 5 03 02 2,02 02     | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                      | jumlah SKKP   | 7500 SK   | 0  | 2000   | 1500   | 75,00                       | 1750  | 3250   | 43,33   |
|                     |   | jumlah SPTKGB   | 3750 SK   | 0  | 1000   | 750  | 75,00                       | 750   | 1500   | 40,00   |
| 5 03 02 2,02 03     | Pengelolaan Promosi ASN   | jumlah formasi JPT yang terisi  | 28 formasi  | 0  | 4  | 8  | 200,00                      | 5   | 13   | 46,43   |
|                     |   | jumlah pejabat fungsional baru non guru non kesehatan                                       | 150 PNS   | 0  | 10   | 28   | 280,00                      | 20  | 48   | 32,00   |
|                     |   | jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, dan fungsional dilantik/dikukuhkan | 2500 orang  | 0  | 800  | 1051   | 131,38                      | 300   | 1351   | 54,04   |
|                     |   | jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya melalui PCAP                           | 84 PNS  | 0  | 14   | 38   | 271,43                      | 15  | 53   | 63,10   |
|                     |   | jumlah PNS yang promosi jabatan administrator   | 75 PNS  | 0  | 15   | 21   | 140,00                      | 30  | 51   | 68,00   |
| <b>5 03 02 2,03</b> | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                                    | <b>Persentase PNS non fungsional yang ikut uji kompetensinya</b>                            | <b>29,18</b> persen   | <b>0</b>   | <b>6,59</b>  | <b>6,15</b>                                  | <b>93,32</b>                | <b>5,36</b>   | <b>11,51</b>   | <b>39,44</b>                                  |
| 5 03 02 2,03 02     | Pengelolaan Assessment Center   | jumlah ASN mengikuti SAP  | 250 PNS   | 0  | 0  | 0  | #DIV/0!                     | 0   | 0  | 0,00  |
|                     |   | jumlah PNS non fungsional yang dinilai kompetensinya  | 800 PNS   | 0  | 200  | 211  | 105,50                      | 100   | 311  | 38,88   |
| 5 03 02 2,03 04     | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                   | jumlah ASN mendapatkan SK tugas belajar dan ijin belajar                                    | 750 PNS   | 0  | 200  | 255  | 127,50                      | 100   | 355  | 47,33   |
|                     |   | jumlah ASN mendapatkan surat penggunaan gelar   | 500 PNS   | 0  | 100  | 125  | 125,00                      | 100   | 225  | 45,00   |
|                     |   | jumlah peserta ujian kedinasan (UDIN, UKPPI)  | 750 PNS   | 0  | 100  | 54   | 54,00                       | 275   | 329  | 43,87   |

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan  | target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024 | Realisasi target Kinerja Capaian Program & Kegiatan s/d Thn 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) |                                     |                             | Target Program & Kegiatan (Renja PD tahun 2021 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d tahun berjalan (2021) |                                      |
|-----------------|---|---|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|
|                 |   |   |  |  | Target Renja Tahun 2020 (n-2)                                      | Realisasi Renja PD Tahun 2020 (n-2) | Tingkat Realisasi (%)       |  | Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun brjln (n-1)                   | Tingkat Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8=(7/6)                     | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                            |
| 5 03 02 2,03 12 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN     | jumlah peserta sosialisasi  | 300 orang  | 0  | 0  | 0                                   | #DIV/0!                     | 0  | 0  | 0,00                                 |
| 5 03 02 2,03 14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional          | Jumlah ASN Fungsional yang difasilitasi uji kompetensinya<br>jumlah ASN yang difasilitasi DUPAK   | 50 PNS<br>100 PNS                                      | 0<br>0   | 5<br>10  | 15<br>20                            | 300,00<br>200,00            | 5<br>10  | 20<br>30   | 40,00<br>30,00                       |
| 5 03 02 2,04    | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                  | <b>Persentase PNS yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya</b>  | <b>100</b> persen                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>#DIV/0!</b>              | <b>80,00</b>   | <b>80,00</b>   | <b>80,00</b>                         |
| 5 03 02 2,04 01 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur    | jumlah SKP Pegawai yang direviu   | 8500 PNS   | 0  | 0  | 0                                   | #DIV/0!                     | 8500   | 8500   | 100,00                               |
| 5 03 02 2,04 02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur             | jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya  | 8500 PNS   | 0  | 0  | 0                                   | #DIV/0!                     | 8500   | 8500   | 100,00                               |
| 5 03 02 2,04 03 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur          | jumlah pegawai yang dievaluasi kinerjanya<br>Jumlah pejabat yang melaporkan LHKPN<br>jumlah usulan Karpeg, Karis dan Karsu yang terealisasi         | 8500 PNS<br>107 peg.<br>1500 kartu                     | 0<br>0<br>0  | 0<br>104<br>300  | 0<br>104<br>528                     | #DIV/0!<br>100,00<br>176,00 | 8500<br>107<br>300                                   | 8500<br>107<br>828   | 100,00<br>100,00<br>55,20            |
| 5 03 02 2,04 04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai                  | jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan /plakat<br>Jumlah PNS sakit menahun yang diperiksa kesehatannya<br>Jumlah PNS yang difasilitasi JKK dan JKM | 2835 PNS<br>25 PNS<br>25 orang                         | 0<br>0<br>0  | 400<br>15<br>5   | 392<br>3<br>2                       | 98,00<br>180,00<br>160,00   | 512<br>5<br>2  | 904<br>8<br>4  | 31,89<br>168,00<br>184,00            |
| 5 03 02 2,04 05 | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai                             | jumlah ASN yang mendapatkan SLKS0   | 500 ASN  | 0  | 87   | 74                                  | 85,06                       | 200  | 274  | 54,80                                |

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan                             | target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024 | Realisasi target Kinerja Capaian Program & Kegiatan s/d Thn 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program & Kegiatan (Renja PD tahun 2021 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d tahun berjalan (2021) |                                      |
|-----------------|---|--|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--------------------------------------|
|                 |   |  |  |  | Target Renja Tahun 2020 (n-2)                                      | Realisasi Renja PD Tahun 2020 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun brjln (n-1)                   | Tingkat Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                            |
| 5 03 02 2,04 07 | Pembinaan Disiplin ASN  | jumlah OPD/UPTD yang dilakukan sidak disiplin PNS                                | 48 OPD   | 0  | 0  | 0                                   | #DIV/0!               | 15   | 15   | 31,25                                |
|                 |   | jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Per-UU                                     | 750 PNS  | 0  | 140  | 195                                 | 139,29                | 250  | 445  | 59,33                                |
| 5 03 02 2,04 08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN               | jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti/ diselesaikan             | 37 kasus   | 0  | 50   | 15                                  | 170,00                | 47   | 47   | 72,97                                |
|                 |   | jumlah SK hukuman disiplin yang dikeluarkan                                      | 37 SK  | 0  | 50   | 15                                  | 30,00                 | 47   | 47   | 72,97                                |
| 5 03 02 2,04 09 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                        | jumlah iijj perceraian yang diterbitkan  | 40 ijin  | 0  | 40   | 24                                  | 60,00                 | 40   | 40   | 100,00                               |
| 5 04            | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                 |  |  |  |  |                                     |                       |  |  |                                      |
| 5 04 02         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                 |  |  |  |  |                                     |                       |  |  |                                      |
|                 |   | Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun      | 80,00 persen   | 0,00   | 0,00   | 47,49                               | #DIV/0!               | 65,01  | 65,01  | 81,26                                |
|                 |   | Persentase PNS mengikuti seminar/ workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan | 50,00 persen   | 0,00   | 0,00   | 33,40                               | #DIV/0!               | 37,10  | 37,10  | 74,20                                |
| 5 04 02 2,01    | Pengembangan Kompetensi Teknis                                  | persentase PNS nonfungsional yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKD      | 10,34 persen   | 0  | 0,17   | 0,17                                | 100,00                | 0,28   | 0,28   | 2,71                                 |

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan   | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan                 | target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024 | Realisasi target Kinerja Capaian Program & Kegiatan s/d Thn 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program & Kegiatan (Renja PD tahun 2021 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d tahun berjalan (2021) |                                      |
|-----------------|---|--|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--------------------------------------|
|                 |   |  |  |  | Target Renja Tahun 2020 (n-2)                                      | Realisasi Renja PD Tahun 2020 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun brjln (n-1)                   | Tingkat Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                            |
| 5 04 02 2,01 01 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                     | jumlah dokumen rencana kebutuhan pengembangan kompetensi teknis umum | 5 dok.   | 0  | 1  | 1                                   | 100,00                | 1  | 2  | 40,00                                |
| 5 04 02 2,01 03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum   | jumlah ASN yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKD            | 100 PNS  | 0  | 5  | 5                                   | 100,00                | 7  | 7  | 7,00                                 |
| 5 04 02 2,01 04 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | jumlah ASN yang dilakukan monitoring dan evaluasi pasca diklat       | 100 PNS  | 0  | 5  | 5                                   | 100,00                | 7  | 7  | 7,00                                 |
| 5 04 02 2,02    | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>  | <b>persentase CPNS mengikuti pelatihan dasar</b>                     | <b>100 persen</b>                                      | <b>0</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>                       | <b>100,00</b>         | <b>60,61</b>   | <b>60,61</b>   | <b>60,61</b>                         |

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan   | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan  | target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024 | Realisasi target Kinerja Capaian Program & Kegiatan s/d Thn 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program & Kegiatan (Renja PD tahun 2021 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d tahun berjalan (2021) |                                      |
|-----------------|---|---|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--------------------------------------|
|                 |   |   |  |  | Target Renja Tahun 2020 (n-2)                                      | Realisasi Renja PD Tahun 2020 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun brjln (n-1)                   | Tingkat Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                            |
| 5 04 02 2,02 01 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional                                      | jumlah dokumen rencana kebutuhan pengembangan kompetensi teknis diklat kepemimpinan, pelatihan dasar dan pelatihan fungsional | 15 dok.  | 0  | 3  | 3                                   | 100,00                | 3  | 6  | 40,00                                |
| 5 04 02 2,02 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan   | jumlah ASN JF non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional   | 150 PNS  | 0  | 60   | 61                                  | 101,67                | 30   | 30   | 20,00                                |
|                 |   | jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar/prajabatan   | 300 PNS  | 0  | 31   | 31                                  | 100,00                | 495  | 300  | 60,61                                |
|                 |   | jumlah peserta pelatihan kepemimpinan   | 25 PNS   | 0  | 3  | 3                                   | 100,00                | 5  | 8  | 32                                   |
| 5 04 02 2,02 08 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | jumlah ASN yang dilakukan monitoring dan evaluasi pasca diklat kepemimpinan, pelatihan dasar dan pelatihan fungsional         | 475 PNS  | 0  | 95   | 95                                  | 100,00                | 335  | 335  | 100,00                               |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 bahwa analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehubungan sampai dengan saat ini belum ada kebijakan yang mengatur tentang NSPK dan SPM dibidang kepegawaian maka kinerja pelayanan tidak dapat dianalisis berdasarkan indikator ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. BKD Kabupaten Tegal pada tahun 2020 tidak melaksanakan tugas pembantuan sehingga hanya melaporkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian yang merupakan bagian dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun analisis terhadap pencapaian indikator sasaran BKD Kabupaten Tegal berdasarkan analisis pencapaian kinerja pelayanan BKD Kabupaten Tegal pada dokumen ini didasarkan pada indikator kinerja kunci (IKK) mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dijelaskan melalui Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Kabupaten Tegal sebagaimana Tabel 2.2 (Tabel T-C.30) sebagai berikut.

**Tabel 2.2 (T-C.30.)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal**

| NO | Indikator | SPM/standar nasional | IKK   | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah |                  |                |                  | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis  |
|----|-----------|----------------------|---|--------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|---|
|    |           |                      |   |        | Tahun 2019 (n-2)                | tahun 2020 (n-1) | tahun 2021 (n) | tahun 2022 (n+1) | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |   |
| 1  | 2         | 3                    | 4   | 5      | 6                               | 7                | 8              | 9                | 10                | 11         | 12         | 13         | 14  |
| 1  |           |                      | Rasio pegawai Pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | persen | -                               | -                | 224,96         | 259,85           | 103,25            | 110,04     | 224,96     | 259,85     | IKK terdapat pada perubahan renstra BKD tahun 2019-2024 |
| 2  |           |                      | Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                           | Persen | -                               | -                | 14,40          | 15,28            | 8,61              | 9,87       | 14,40      | 15,28      |   |
| 3  |           |                      | Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)  | persen | -                               | -                | 92,94          | 93,26            | 93,36             | 93,50      | 92,94      | 93,26      |   |



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal adalah perangkat daerah yang mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja kunci pelayanan perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan peraturan ini terbit pada tahun 2020, maka tidak ada target yang ditetapkan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Capaian untuk ketiga indikator ini pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian indikator ini antara lain :

1. Pengadaan CASN formasi tahun 2019 mensyaratkan pendidikan berasal dari lulusan perguruan tinggi yaitu diploma II, diploma III dan sarjana;
2. Adanya kebijakan inpassing untuk menduduki beberapa formasi jabatan fungsional selain guru dan tenaga Kesehatan memberikan kemudahan bagi PNS yang ingin beralih status menjadi pejabat fungsional;
3. Untuk diangkat menjadi pejabat fungsional, mempersyaratkan kelulusan uji kompetensi sehingga sertifikat kompetensi dimiliki oleh PNS yang menduduki jabatan fungsional diluar guru dan tenaga Kesehatan.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD Kabupaten Tegal dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai kepada seluruh pegawai guna mendapatkan pengembangan kompetensi yang menunjang tugas pokok dan fungsinya. Hal ini karena kompetensi aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu unsur utama dalam tingkat Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
2. Dampak pandemi covid-19 turut mempengaruhi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik selain masih rendahnya kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik.
3. Kebijakan pemerintah tentang penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional perlu didukung dengan peningkatan kompetensi dan prestasi.

4. Sesuai Undang-Undang nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka CPNS formasi 2019 yang diangkat pada awal tahun 2020 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan pelatihan dasar pada tahun 2022;

Adapun solusi atau langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal untuk meningkatkan kinerja antara lain :

1. Peningkatan kompetensi PNS melalui Pendidikan dan Pelatihan dengan metode non klasikal;
2. Mendorong peningkatan kualitas dan implementasi roadmap sistem merit dalam manajemen ASN;
3. Perubahan *mindset* bahwa jabatan fungsional bukanlah jabatan alternatif, penyetaraan jabatan fungsional tidak menunggu rekomendasi instansi Pembina jabatan fungsional, namun pengalihannya kedalam jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang sebelumnya diduduki.
4. Pemenuhan kebutuhan sarana perkantoran, kepegawaian, keuangan dan administrasi pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Beberapa catatan penting hasil review terhadap rancangan awal RKPD (Renja) BKD Kabupaten Tegal sebagai berikut :

- a. Pagu awal BKD Kabupaten Tegal tahun anggaran 2022 tidak termasuk gaji dan tunjangan pegawai adalah sebesar Rp. 5.435.245.100,- (lima milyar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
- b. Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal pada tanggal 24 Februari 2021 menghasilkan keputusan penetapan kebutuhan pagu anggaran tahun 2022 selain gaji dan tunjangan pegawai sejumlah Rp. 10.606.481.000,- (sepuluh milyar enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- c. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal mengalokasikan pagu anggaran tahun 2022 untuk BKD selain gaji dan tunjangan pegawai sejumlah 5.442.245.100,- ((lima milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2022 tanggal 30 Maret 2021;
- d. Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal tahun 2022 adalah sejumlah Rp 8.944.571.000,- (delapan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- e. Secara umum indikator kinerja program, kegiatan dan pagu anggaran dalam rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan indikator program, kegiatan, subkegiatan. dan pagu anggaran hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan pada tahapan forum perangkat daerah. Namun, pagu anggaran menjadi berkurang pada RKPD Kabupaten Tegal tahun anggaran 2022.

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.3 (Tabel T-C.31) sebagai berikut :

**Tabel 2.3. (Tabel T-C.31)**  
**Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah**  
**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2022**

| Kode | Rancangan Awal RKPD Tahun 2022                                  |        |   |   |  | Hasil Analisis Kebutuhan  |  |   |  |   | Catatan penting |  |                            |         |  |
|------|---|--------|---|---|--|---|--|---|--|---|-----------------|--|----------------------------|---------|--|
|      | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan        | target Capaian  | Pagu Indikatif (ribuan)  | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Lokasi   | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan                        | target Capaian   | Kebutuhan Dana                                  |                 |  |                            |         |  |
| 1    | 2   | 3      | 4   | 5   | 6  | 7   | 8  | 9   | 10   | 11  | 12              |  |                            |         |  |
| 5    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                             |        |   |   |  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                             |  |   |  |   |                 |  |                            |         |  |
| 5    | 03  |        | KEPEGAWAIAN   |   | 3.948.245.   | KEPEGAWAIAN   |  |   |  | 7.464.071.                                      |                 |  |                            |         |  |
| 5    | 03  | 01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah | 100,00 persen  | 993.245.  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah | 100,00 persen  | 4.716.059.                                      |                 |  |                            |         |  |
| 5    | 03  | 01     | 2,01  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang tersedia | 20,00 persen  | 60.000.  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang tersedia | 20,00 persen                                    | 60.000.         |  |                            |         |  |
| 5    | 03  | 01     | 2,01  | 01  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | BKD Kab.Tegal   | jumlah dokumen RTP SPIP<br>jumlah dokumen renja/perubahan renja<br>jumlah dokumen renja RB | 5 dok.<br>5 dok.<br>5 dok.  | 25.000.  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | BKD Kab.Tegal   | jumlah dokumen RTP SPIP<br>jumlah dokumen renja/perubahan renja<br>jumlah dokumen renja RB | 5 dok.<br>5 dok.<br>5 dok. | 25.000. |  |

| Kode | Rancangan Awal RKPD Tahun 2022                                  |        |  |                |   | Hasil Analisis Kebutuhan  |   |  |                |   | Catatan penting |   |                     |                   |  |
|------|---|--------|--|----------------|---|---|---|--|----------------|---|-----------------|---|---------------------|-------------------|--|
|      | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan | target Capaian | Pagu Indikatif (ribuan)   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Lokasi  | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan | target Capaian | Kebutuhan Dana  |                 |   |                     |                   |  |
|      | 1   | 2      | 3  | 4              | 5   | 6   | 7   | 8  | 9              | 10  |                 | 11  | 12                  |                   |  |
|      |   |        | jumlah dokumen renstra/Perubahan                     | 5 dok.         |   |   |   |  |                |   |                 |   |                     |                   |  |
| 5    | 03  | 01     | 2,01   | 06             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | BKD Kab.Tegal   | jumlah dokumen pelaporan kinerja  | 8 dok  | 35.000.        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | BKD Kab.Tegal   | jumlah dokumen pelaporan kinerja  | 8 jenis             | 35.000.           |  |
| 5    | 03  | 01     | 2,02   |                | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |   | <b>persentase pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya sesuai dengan peraturan</b> | <b>20,00 persen</b>                                  | <b>68.000.</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |                 | <b>persentase pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya sesuai dengan peraturan</b> | <b>20,00 persen</b> | <b>3.570.326.</b> |  |
| 5    | 03  | 01     | 2,02   | 01             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | BKD Kab.Tegal   | gaji dan tunjangan ASN yang disediakan  | 14 bln   | -              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | BKD Kab.Tegal   | gaji dan tunjangan ASN yang disediakan  | 14 bln              | 3.502.326.        |  |
| 5    | 03  | 01     | 2,02   | 03             | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | BKD Kab.Tegal   | jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan                                   | 12 bln   | 62.900.        | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | BKD Kab.Tegal   | jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan                                   | 12 bln              | 68.000.           |  |
| 5    | 03  | 01     | 2,02   | 05             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | BKD Kab.Tegal   | jumlah pelaporan keuangan yang dibuat   | 8 jenis  | 5.100.         |   | BKD Kab.Tegal   | jumlah pelaporan keuangan yang dibuat   | 8 jenis             | -                 |  |
| 5    | 03  | 01     | 2,05   |                | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |   | <b>persentase ASN BKD yang mengikuti pelatihan/bimtek</b>                               | <b>20,00 persen</b>                                  | <b>25.000.</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |                 | <b>persentase ASN BKD yang mengikuti pelatihan/bimtek</b>                               | <b>20,00 persen</b> | <b>55.000.000</b> |  |
| 5    | 03  | 01     | 2,05   | 09             | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jateng, DIY   | jumlah ASN BKD yang mengikuti pelatihan/bimtek  | 55 ASN   | 25.000.        | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jateng, DIY     | jumlah ASN BKD yang mengikuti pelatihan/bimtek  | 55 ASN              | 55.000.           |  |

| Kode           | Rancangan Awal RKPD Tahun 2022                                   |                  |   |                     |                         | Hasil Analisis Kebutuhan   |                  |   |                     |                | Catatan penting |
|----------------|--|------------------|---|---------------------|-------------------------|--|------------------|---|---------------------|----------------|-----------------|
|                | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan  | Lokasi           | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan  | target Capaian      | Pagu Indikatif (ribuan) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan  | Lokasi           | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan  | target Capaian      | Kebutuhan Dana |                 |
|                | 1  | 2                | 3   | 4                   | 5                       | 6  | 7                | 8   | 9                   | 10             |                 |
| 5 03 01 2,06   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                  | persentase sarana administrasi umum yang tersedia   | 100,00 persen       | 229.749.                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                  | persentase sarana administrasi umum yang tersedia   | 100,00 persen       | 250.220.       |                 |
| 5 03 01 2,0601 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | BKD Kab.Tegal    | jumlah penerangan bangunan kantor   | 9 jenis             | 7.000.                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | BKD Kab.Tegal    | jumlah penerangan bangunan kantor   | 10 jenis            | 7.000.         |                 |
| 5 03 01 2,0602 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kab.Tegal        | jumlah ATK TIK yang dibeli<br>jumlah ATK yang dibeli  | 9 jenis<br>63 jenis | 63.983.                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kab.Tegal        | jumlah ATK TIK yang dibeli<br>jumlah ATK yang dibeli  | 9 jenis<br>54 jenis | 63.850.        |                 |
| 5 03 01 2,0604 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kab.Tegal        | jumlah bulan pegawai,tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan  | 11 bln              | 35.816.                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kab.Tegal        | jumlah bulan pegawai,tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan  | 11 bln              | 35.810.        |                 |
| 5 03 01 2,0605 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Kab.Tegal        | jumlah barang cetakan   | 13 jenis            | 20.000.                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Kab.Tegal        | jumlah barang cetakan   | 8 jenis             | 20.000.        |                 |
| 5 03 01 2,0606 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | BKD Kab.Tegal    | penyediaan bahan bacaan   | 2880 eks            | 9.500.                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | BKD Kab.Tegal    | penyediaan bahan bacaan   | 2112 eks            | 10.560.        |                 |
| 5 03 01 2,0609 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jateng, DIY, DKI | jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi<br>jumlah rapat koordinasi bidang kepegawaian | 11 bulan<br>1 keg.  | 93.450.                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jateng, DIY, DKI | jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi<br>jumlah rapat koordinasi bidang kepegawaian | 11 bulan<br>1 keg.  | 113.000.       |                 |

| Kode           | Rancangan Awal RKPD Tahun 2022                                   |               |  |   |                         | Hasil Analisis Kebutuhan   |               |  |   |                | Catatan penting |
|----------------|--|---------------|--|---|-------------------------|--|---------------|--|---|----------------|-----------------|
|                | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan  | Lokasi        | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan   | target Capaian  | Pagu Indikatif (ribuan) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan  | Lokasi        | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan   | target Capaian  | Kebutuhan Dana |                 |
|                | 1  | 2             | 3  | 4   | 5                       | 6  | 7             | 8  | 9   | 10             |                 |
| 5.03.01.2.07   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |               | persentase barang milik daerah yang tersedia   | 47,17 persen  | 99.500.                 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |               | persentase barang milik daerah yang tersedia   | 47,17 persen  | 181.263.       |                 |
| 5.03.01.2.0705 | Pengadaan Mebel  | BKD Kab.Tegal | almari kaca arsip  | 1 buah  | 6.000.                  | Pengadaan Mebel  | BKD Kab.Tegal | almari arsip besi rak besi   | 1 buah<br>5 buah  | 15.563.        |                 |
| 5.03.01.2.0706 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | BKD Kab.Tegal | AC<br>CCTV<br>Conference cam webcam<br>CPU/Desktop<br>Handycam<br>Laptop<br>LCD projector<br>LED TV 55"<br>Mesin penghancur kertas<br>Perekam suara digital<br>Printer<br>screen projector | 4 buah<br>0 paket<br>0 buah<br>1 buah<br>0 buah<br>5 buah<br>0 buah<br>0 buah<br>1 buah<br>0 buah<br>3 buah<br>0 buah | 93.500.                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | BKD Kab.Tegal | AC<br>CCTV<br>Conference cam webcam<br>CPU/Desktop<br>Handycam<br>Laptop<br>LCD projector<br>LED TV 55"<br>Mesin penghancur kertas<br>Perekam suara digital<br>Printer<br>screen projector | 5 buah<br>2 paket<br>1 buah<br>2 buah<br>2 buah<br>5 buah<br>1 buah<br>1 buah<br>1 buah<br>4 buah<br>2 buah<br>1 buah | 165.700.       |                 |
| 5.03.01.2.08   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |               | persentase jasa penunjang urusan yang terbayar   | 20,00 persen  | 197.600.                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |               | persentase jasa penunjang urusan yang terbayar   | 20,00 persen  | 280.000.       |                 |
| 5.03.01.2.0802 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | BKD Kab.Tegal | jasa komunikasi,sumber daya listrik dan air  | 12 bulan  | 135.000.                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | BKD Kab.Tegal | jasa komunikasi,sumber daya listrik dan air  | 12 bulan  | 162.000.       |                 |

| Kode            | Rancangan Awal RKPD Tahun 2022   |               |  |  |                         | Hasil Analisis Kebutuhan   |               |  |  |                 | Catatan penting |
|-----------------|--|---------------|--|--|-------------------------|--|---------------|--|--|-----------------|-----------------|
|                 | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan  | Lokasi        | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan   | target Capaian   | Pagu Indikatif (ribuan) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan  | Lokasi        | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan   | target Capaian   | Kebutuhan Dana  |                 |
| 1               | 2  | 3             | 4  | 5  | 6                       | 7  | 8             | 9  | 10   | 11              | 12              |
| 5 03 01 2,08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | BKD Kab.Tegal | gedung kantor yang bersih dan terpelihara<br><br>jumlah pameran pembangunan yang diikuti   | 12 bulan<br><br>1 keg.                                 | 62.600.                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | BKD Kab.Tegal | gedung kantor yang bersih dan terpelihara<br><br>jumlah pameran pembangunan yang diikuti   | 12 bulan<br><br>1 paket                                | 118.000.        |                 |
| 5 03 01 2,09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |               | <b>persentase barang milik daerah yang dipelihara</b>  | <b>20,00 persen</b>                                    | <b>313.396.</b>         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |               | <b>persentase barang milik daerah yang dipelihara</b>  | <b>20,00 persen</b>                                    | <b>319.250.</b> |                 |
| 5 03 01 2,09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab.Tegal     | jumlah kendaraan dinas (mobil) yang dipelihara<br><br>jumlah kendaraan dinas (sepeda motor) yang dipelihara                                  | 6 unit<br><br>11 unit                                  | 176.841.                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab.Tegal     | jumlah kendaraan dinas (mobil) yang dipelihara<br><br>jumlah kendaraan dinas (sepeda motor) yang dipelihara                                  | 6 unit<br><br>11 unit                                  | 175.000.        |                 |
| 5 03 01 2,09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Kab.Tegal     | AC yang dipelihara<br><br>CPU/Laptop yang dipelihara<br>LCD proyektor yang dipelihara<br>mebelair yang dipelihara<br>printer yang dipelihara | 17 unit<br><br>10 unit<br>2 unit<br>25 unit<br>11 unit | 41.144.                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Kab.Tegal     | AC yang dipelihara<br><br>CPU/Laptop yang dipelihara<br>LCD proyektor yang dipelihara<br>mebelair yang dipelihara<br>printer yang dipelihara | 19 unit<br><br>15 unit<br>3 unit<br>10 unit<br>11 unit | 44.250.         |                 |



| Kode           | Rancangan Awal RKPD Tahun 2022                                  |               |  |                |                         | Hasil Analisis Kebutuhan  |               |  |                |                   | Catatan penting |
|----------------|---|---------------|--|----------------|-------------------------|---|---------------|--|----------------|-------------------|-----------------|
|                | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Lokasi        | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan   | target Capaian | Pagu Indikatif (ribuan) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Lokasi        | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan   | target Capaian | Kebutuhan Dana    |                 |
| 1              | 2   | 3             | 4  | 5              | 6                       | 7   | 8             | 9  | 10             | 11                | 12              |
| 5 03 01 2,0909 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya    | BKD Kab.Tegal | jumlah gedung kantor yang dipelihara   | 1 unit         | 95.411.                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya    | BKD Kab.Tegal | jumlah gedung kantor yang dipelihara   | 1 unit         | 100.000.          |                 |
| 5 03 02        | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                               |               |  |                | <b>2.955.000.</b>       | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                               |               |  |                | <b>2.748.012.</b> |                 |
|                |   |               | Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan                              | 0,12 persen    |                         |   |               | Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan                              | 0,12 persen    |                   |                 |
|                |   |               | Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya                               | 91,50 persen   |                         |   |               | Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya                               | 91,50 persen   |                   |                 |
|                |   |               | Persentase jabatan fungsional terisi sesuai dengan kompetensinya                               | 38,79 persen   |                         |   |               | Persentase jabatan fungsional terisi sesuai dengan kompetensinya                               | 38,79 persen   |                   |                 |
|                |   |               | Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)   | 224,96 persen  |                         |   |               | Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)   | 224,96 persen  |                   |                 |
|                |   |               | Rasio pegawai fungsional (%)   | 14,40 persen   |                         |   |               | Rasio pegawai fungsional (%)   | 14,40 persen   |                   |                 |
|                |   |               | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan | 92,94 persen   |                         |   |               | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan | 92,94 persen   |                   |                 |

|      |    |    |      | Rancangan Awal RKPD Tahun 2022   |                  |  |                |                         | Hasil Analisis Kebutuhan   |  |  |                                |                |                 |  |
|------|----|----|------|--|------------------|--|----------------|-------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------|-----------------|--|
| Kode |    |    |      | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                        | Lokasi           | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan | target Capaian | Pagu Indikatif (ribuan) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                        | Lokasi   | Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan | target Capaian                 | Kebutuhan Dana | Catatan penting |  |
| 1    | 2  | 3  | 4    | 5  | 6                | 7  | 8              | 9                       | 10   | 11   | 12   |                                |                |                 |  |
| 5    | 03 | 02 | 2,01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                 |                  | persentase formasi CASN terisi                       | 100,00 persen  | 1.500.000.              |  | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN |  | persentase formasi CASN terisi | 100,00 persen  | 1.376.812.      |  |
| 5    | 03 | 02 | 2,01 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | BKD Kab. Tegal   | jumlah kebutuhan PNS yang diusulkan                  | 100 formasi    | 85.000.                 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | BKD Kab. Tegal   | jumlah dokumen rencana kebutuhan pegawai             | 5 dok.                         | 72.500.        |                 |  |
|      |    |    |      |  |                  | jumlah kebutuhan PPPK yang diusulkan                 | 500 formasi    |                         |  |  |  |                                |                |                 |  |
| 5    | 03 | 02 | 2,01 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN   | Jateng, DIY, DKI | jumlah CASN  | 600 CPNS       | 1.105.000.              | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN   | Jateng, DIY, DKI                                       | jumlah CASN  | 600 CPNS                       | 725.812.       |                 |  |
|      |    |    |      |  |                  | jumlah CPNS diangkat menjadi PNS                     | 415 CPNS       |                         |  |  | jumlah CPNS diangkat menjadi PNS                     | 495 CPNS                       |                |                 |  |
|      |    |    |      |  |                  | jumlah formasi yang tidak terisi                     | 4 formasi      |                         |  |  |  |                                |                |                 |  |
|      |    |    |      |  |                  | jumlah pelamar                                       | 18000 orang    |                         |  |  |  |                                |                |                 |  |
|      |    |    |      |  |                  | jumlah pelamar lulus administrasi                    | 17000 orang    |                         |  |  |  |                                |                |                 |  |
|      |    |    |      |  |                  | jumlah pelamar lulus SKD                             | 4500 orang     |                         |  |  |  |                                |                |                 |  |

|                                       |          |  |               |   |   |                                |  |                     |   |   |                       |   |                     |                 |  |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|---|---|--------------------------------|--|---------------------|---|---|-----------------------|---|---------------------|-----------------|--|
| 5                                     | 03       | 02   | 2,01          | 06  | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jateng, DIY, DKI               | jumlah SK pensiun (BUP, APS, janda/duda/anak)  | 650 SK              | 70.000.   | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jateng, DIY, DKI      | jumlah SK pensiun (BUP, APS, janda/duda/anak)   | 650 SK              | 85.000.         |  |
| <b>Rancangan Awal RKPD Tahun 2022</b> |          |  |               |   |   |                                |  |                     |   |   |                       |   |                     |                 |  |
| <b>Hasil Analisis Kebutuhan</b>       |          |  |               |   |   |                                |  |                     |   |   |                       |   |                     |                 |  |
| <b>Kode</b>                           |          | <b>Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan</b> | <b>Lokasi</b> | <b>Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan</b> | <b>target Capaian</b>                             | <b>Pagu Indikatif (ribuan)</b> | <b>Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan</b>                   | <b>Lokasi</b>       | <b>Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan</b> | <b>target Capaian</b>                             | <b>Kebutuhan Dana</b> | <b>Catatan penting</b>  |                     |                 |  |
| <b>1</b>                              | <b>2</b> | <b>3</b>   | <b>4</b>      | <b>5</b>  | <b>6</b>  | <b>7</b>                       | <b>8</b>   | <b>9</b>            | <b>10</b>   | <b>11</b>   | <b>12</b>             |   |                     |                 |  |
| 5                                     | 03       | 02   | 2,01          | 10  | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jateng, DIY, DKI               | jumlah dokumen profil kepegawaian  | 2 dok.              | 200.000.  | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jateng, DIY, DKI      | jumlah komputer server baru   | 1 unit              | 333.500.        |  |
|                                       |          |  |               |   |   |                                | jumlah pegawai yang dikelola melalui SIMPEG  | 9550 ASN            |   |   |                       | jumlah pegawai yang dikelola melalui SIMPEG   | 9420 ASN            |                 |  |
|                                       |          |  |               |   |   |                                | jumlah pembangunan/ pengembangan SIM   | 3 aplikasi          |   |   |                       | jumlah pembangunan/ pengembangan SIM  | 3 aplikasi          |                 |  |
|                                       |          |  |               |   |   |                                | jumlah sistem informasi yang dipelihara  | 8 aplikasi          |   |   |                       | jumlah sistem informasi yang dipelihara   | 8 aplikasi          |                 |  |
| 5                                     | 03       | 02   | 2,01          | 11  | Pengelolaan Data Kepegawaian                      | BKD Kab.Tegal                  | dokumen kepegawaian yang dipelihara  | 9550 ASN            | 40.000.   | Pengelolaan Data Kepegawaian                      | BKD Kab.Tegal         | dokumen kepegawaian yang dipelihara   | 9550 ASN            | 160.000.        |  |
|                                       |          |  |               |   |   |                                | jumlah dokumen profil kepegawaian  | 9550 buah           |   |   |                       | KIP yang dicetak  | 1500 buah           |                 |  |
|                                       |          |  |               |   |   |                                | KIP yang dicetak   | 1500 buah           |   |   |                       | Latomap folder baru   | 1500 buah           |                 |  |
| 5                                     | 03       | 02   | 2,02          |   | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                     |                                | <b>persentase formasi JPT Pratama dan Jabatan Administrator (kepala SKPD/camat) yang</b> | <b>96,30 persen</b> | <b>775.000.</b>   | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                     |                       | <b>persentase formasi JPT Pratama dan Jabatan Administrator (kepala SKPD/camat) yang terisi</b> | <b>96,30 persen</b> | <b>698.500.</b> |  |

|                                       |          |  |               |   |                       |  |  |               |   |                       |  |   |          |  |  |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|---|-----------------------|--|--|---------------|---|-----------------------|--|---|----------|--|--|
|                                       |          |  |               |   |                       |  | terisi   |               |   |                       |  |   |          |  |  |
| 5                                     | 03       | 02   | 2,0201        | Pengelolaan Mutasi ASN                                      | Jateng, DIY, DKI      | jumlah PNS Mutasi antar instansi daerah, antar intansi pusat dan instansi daerah   | 30 PNS   | 424.932.      | Pengelolaan Mutasi ASN                                      | Jateng, DIY, DKI      | jumlah PNS Mutasi antar instansi daerah, antar intansi pusat dan instansi daerah   | 30 PNS                                      | 125..    |  |  |
| <b>Rancangan Awal RKPD Tahun 2022</b> |          |  |               |   |                       | <b>Hasil Analisis Kebutuhan</b>  |  |               |   |                       |  |   |          |  |  |
| <b>Kode</b>                           |          | <b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan</b> | <b>Lokasi</b> | <b>Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan</b> | <b>target Capaian</b> | <b>Pagu Indikatif (ribuan)</b>   | <b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan</b> | <b>Lokasi</b> | <b>Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan</b> | <b>target Capaian</b> | <b>Kebutuhan Dana</b>  | <b>Catatan penting</b>                      |          |  |  |
| <b>1</b>                              | <b>2</b> | <b>3</b>   | <b>4</b>      | <b>5</b>  | <b>6</b>              | <b>7</b>   | <b>8</b>   | <b>9</b>      | <b>10</b>   | <b>11</b>             | <b>12</b>  |   |          |  |  |
| 5                                     | 03       | 02   | 2,0202        | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                            | Jateng, DIY, DKI      | jumlah CPNS yang disumpah menjadi PNS<br>jumlah SKKP<br>jumlah SPTKGB  | 767 SK<br>1750 SK<br>750 SK  | 203.501.      | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                            | Jateng, DIY, DKI      | jumlah SKKP<br>jumlah SPTKGB   | 1750 SK<br>750 SK                           | 141.500. |  |  |
| 5                                     | 03       | 02   | 2,0203        | Pengelolaan Promosi ASN                                     | Jateng, DIY, DKI      | jumlah formasi JPT yang terisi<br>jumlah kepala sekolah yang dilantik<br>jumlah pejabat fungsional baru non guru non kesehatan<br>jumlah Pejabat fungsional yang dilantik/dikukuhkan | 2 formasi<br>100 orang<br>61 PNS<br>55 orang                           | 146.567.      | Pengelolaan Promosi ASN                                     | Jateng, DIY, DKI      | jumlah formasi JPT yang terisi<br>jumlah kepala sekolah yang dilantik<br>jumlah pejabat fungsional baru non guru non kesehatan<br>jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, dan fungsional yang dilantik/dikukuhkan | 2 formasi<br>100 orang<br>61 PNS<br>355 PNS | 432.000. |  |  |

|                                       |          |  |               |   |                                     |   |  |                               |   |                                     |   |   |                    |          |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|---|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------|----------|
|                                       |          |  |               |   |                                     | jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya melalui PCAP | 30 PNS   |                               |   |                                     | jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya melalui PCAP | 10 PNS  |                    |          |
|                                       |          |  |               |   |                                     | jumlah PNS yang promosi jabatan administrator                     | 30 PNS   |                               |   |                                     | jumlah PNS yang promosi jabatan administrator dan pengawas        | 30 PNS  |                    |          |
| 5                                     | 03       | 02   | 2,03          |   | Pengembangan Kompetensi ASN         | Persentase PNS non fungsional yang ikut uji kompetensinya         | 5,36 persen  | 335.000.                      | Pengembangan Kompetensi ASN                                 |                                     | Persentase PNS non fungsional yang ikut uji kompetensinya         | 5,36 persen   | 327.000.           |          |
| <b>Rancangan Awal RKPD Tahun 2022</b> |          |  |               |   |                                     |   |  |                               |   |                                     |   |   |                    |          |
| <b>Hasil Analisis Kebutuhan</b>       |          |  |               |   |                                     |   |  |                               |   |                                     |   |   |                    |          |
| <b>Kode</b>                           |          | <b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan</b> | <b>Lokasi</b> | <b>Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan</b> | <b>target Capaian</b>               | <b>Pagu Indikatif (ribuan)</b>                                    | <b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan</b>   | <b>Lokasi</b>                 | <b>Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan</b> | <b>target Capaian</b>               | <b>Kebutuhan Dana</b>   | <b>Catatan penting</b>  |                    |          |
| <b>1</b>                              | <b>2</b> | <b>3</b>   | <b>4</b>      | <b>5</b>  | <b>6</b>                            | <b>7</b>  | <b>8</b>   | <b>9</b>                      | <b>10</b>   | <b>11</b>                           | <b>12</b>   |   |                    |          |
| 5                                     | 03       | 02   | 2,03          | 02  | Pengelolaan Assessment Center       | Kab.Tegal   | jumlah ASN yang mengikuti SAP<br>jumlah PNS non fungsional yang dinilai kompetensinya<br>jumlah PNS non fungsional yang lulus uji kompetensi | 100 PNS<br>175 PNS<br>157 PNS | 248.897.  | Pengelolaan Assessment Center       | Kab.Tegal   | jumlah ASN yang mengikuti SAP<br>jumlah PNS non fungsional yang dinilai kompetensinya                     | 100 PNS<br>175 PNS | 194.800. |
| 5                                     | 03       | 02   | 2,03          | 04  | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jateng, DIY   | jumlah ASN mendapatkan SK tugas belajar dan ijin belajar<br>jumlah ASN mendapatkan surat penggunaan gelar                                    | 200 PNS<br>100 PNS            | 40.000.   | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jateng, DIY   | jumlah ASN mendapatkan SK tugas belajar dan ijin belajar<br>jumlah ASN mendapatkan surat penggunaan gelar | 200 PNS<br>100 PNS | 62.000.  |

|                                       |          |  |          |               |  |  |  |  |           |  |   |  |                       |                        |
|---------------------------------------|----------|--|----------|---------------|--|--|--|--|-----------|--|---|--|-----------------------|------------------------|
|                                       |          |  |          |               |  | jumlah peserta ujian kedinasan (UDIN, UKPPI) | 100 PNS  |  |           |  | jumlah peserta ujian kedinasan (UDIN, UKPPI)                | 300 PNS  |                       |                        |
| 5                                     | 03       | 02   | 2,03     | 12            | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN  | BKD Kab.Tegal                                | jumlah peserta sosialisasi                                   | 100 orang  | 15.000.   | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN  | BKD Kab.Tegal   | jumlah peserta sosialisasi                                   | 100 orang             | 24.700.                |
| 5                                     | 03       | 02   | 2,03     | 13            | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                             | Jateng, DKI                                  | umlah ASN yang difasilitasi DUPAK JFT instansi pembina       | 25 PNS   | 31.103.   |  |   |  |                       |                        |
| 5                                     | 03       | 02   | 2,03     | 14            |  |  |  |  |           | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional       | Jateng, DKI   | jumlah ASN fungsional difasilitasi uji kompetensinya         | 10 PNS                | 45.500.                |
|                                       |          |  |          |               |  |  |  |  |           |  |   | jumlah ASN yang difasilitasi DUPAK                           | 25 PNS                |                        |
| <b>Rancangan Awal RKPD Tahun 2022</b> |          |  |          |               |  |  |  |  |           |  |   |  |                       |                        |
| <b>Hasil Analisis Kebutuhan</b>       |          |  |          |               |  |  |  |  |           |  |   |  |                       |                        |
| <b>Kode</b>                           |          | <b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan</b> |          | <b>Lokasi</b> | <b>Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan</b>  | <b>target Capaian</b>                        | <b>Pagu Indikatif (ribuan)</b>                               | <b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan</b> |           | <b>Lokasi</b>  | <b>Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan</b> | <b>target Capaian</b>  | <b>Kebutuhan Dana</b> | <b>Catatan penting</b> |
| <b>1</b>                              | <b>2</b> | <b>3</b>   | <b>4</b> | <b>5</b>      | <b>6</b>   | <b>7</b>                                     | <b>8</b>   | <b>9</b>   | <b>10</b> | <b>11</b>  | <b>12</b>   |  |                       |                        |
| 5                                     | 03       | 02   | 2,04     |               | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>               |  | <b>Persentase PNS yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya</b> | 80,00 persen   | 345.000.  | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>               |   | <b>Persentase PNS yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya</b> | 80,00 persen          | 345.700.               |
| 5                                     | 03       | 02   | 2,04     | 01            | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | BKD Kab.Tegal                                | jumlah perbup yang disusun                                   | 1 perbup   | 45.000.   | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | BKD Kab.Tegal   | jumlah SKP Pegawai yang direviu                              | 9700 PNS              | 64.000.                |
| 5                                     | 03       | 02   | 2,04     | 02            | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur          | BKD Kab.Tegal                                | jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya                       | 8807 PNS   | 10.000.   | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur          | BKD Kab.Tegal   | jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya                       | 9700 PNS              | 10.000.                |
| 5                                     | 03       | 02   | 2,04     | 03            | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur       | BKD Kab.Tegal                                | jumlah JPT dan Administrator yang diperiksa kesehatannya     | 5 PNS  | 63.500.   | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur       | BKD Kab.Tegal   | jumlah pegawai yang dievaluasi kinerjanya                    | 9700 PNS              | 23.000.                |

|                                       |    |  |      |               |   |   |   |                                |  |  |                                      |   |                 |                       |                       |                        |
|---------------------------------------|----|--|------|---------------|---|---|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                       |    |  |      |               |   | jumlah pegawai yang dievaluasi kinerjanya       | 8807 PNS  |                                |  |  | Jumlah pejabat yang melaporkan LHKPN | 107 peg.  |                 |                       |                       |                        |
|                                       |    |  |      |               |   | jumlah PNS sakit menahun diperiksa kesehatannya | 10 PNS  |                                |  |  | jumlah ASN yang difasilitasi DUPAK   | 300 kartu   |                 |                       |                       |                        |
|                                       |    |  |      |               |   | jumlah PNS difasilitasi JKK/JKM                 | 10 orang  |                                |  |  |                                      |   |                 |                       |                       |                        |
|                                       |    |  |      |               |   | jumlah PTT yang diterbitkan SPT nya             | 103 orang                                       |                                |  |  |                                      |   |                 |                       |                       |                        |
| 5                                     | 03 | 02   | 2,04 | 04            | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai              | BKD Kab.Tegal                                   | jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan /plakat | 300 PNS                        | 110.000.   | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | BKD Kab.Tegal                        | jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan /plakat             | 412 PNS         | 151.000.              |                       |                        |
|                                       |    |  |      |               |   |   |   |                                |  |  |                                      | Jumlah PNS sakit menahun yang diperiksa kesehatannya        | 10 PNS          |                       |                       |                        |
| <b>Rancangan Awal RKPD Tahun 2022</b> |    |  |      |               |   |   |   |                                |  |  |                                      | <b>Hasil Analisis Kebutuhan</b>                             |                 |                       |                       |                        |
| <b>Kode</b>                           |    | <b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan</b> |      | <b>Lokasi</b> | <b>Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan</b> |   | <b>target Capaian</b>                           | <b>Pagu Indikatif (ribuan)</b> | <b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan</b> |  | <b>Lokasi</b>                        | <b>Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan</b> |                 | <b>target Capaian</b> | <b>Kebutuhan Dana</b> | <b>Catatan penting</b> |
| <b>1</b>                              |    | <b>2</b>   |      | <b>3</b>      | <b>4</b>  |   | <b>5</b>  | <b>6</b>                       | <b>7</b>   |  | <b>8</b>                             | <b>9</b>  |                 | <b>10</b>             | <b>11</b>             | <b>12</b>              |
|                                       |    |  |      |               |   |   |   |                                |  |  |                                      | Jumlah PNS yang difasilitasi JKK dan JKM                    | 5 orang         |                       |                       |                        |
| 5                                     | 03 | 02   | 2,04 | 05            | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai                         | BKD Kab.Tegal                                   | jumlah ASN yang mendapatkan SLKS                | 150 ASN                        | 6.000.   | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai            | BKD Kab.Tegal                        | jumlah ASN yang mendapatkan SLKS                            | 200 ASN         | 6.000.                |                       |                        |
| 5                                     | 03 | 02   | 2,04 | 07            | Pembinaan Disiplin ASN                                      | Kab.Tegal                                       | jumlah ASN mendapatkan pembinaan disiplin       | 100 ASN                        | 61.800.  | Pembinaan Disiplin ASN                         | Kab.Tegal                            | jumlah ASN mendapatkan pembinaan disiplin                   | 100 ASN         | 50.000.               |                       |                        |
|                                       |    |  |      |               |   |   | jumlah OPD/UPTD yang disidak disiplin PNS       | 30 OPD/instansi                |  |  |                                      | jumlah OPD/UPTD yang disidak disiplin PNS                   | 30 OPD/instansi |                       |                       |                        |
|                                       |    |  |      |               |   |   | jumlah pejabat melaporkan LHKPN                 | 107 PNS                        |  |  |                                      | jumlah pejabat melaporkan LHKPN                             | 107 PNS         |                       |                       |                        |

|                                       |    |  |      |               |   |   |  |   |         |   |   |  |                       |                        |  |
|---------------------------------------|----|--|------|---------------|---|---|--|---|---------|---|---|--|-----------------------|------------------------|--|
|                                       |    |  |      |               |   | jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Per-UU        | 1500 PNS   |   |         |   | jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Per-UU                | 1500 PNS   |                       |                        |  |
|                                       |    |  |      |               |   | jumlah usulan Karpeg, Karis, Karsu yang terealisasi | 250 kartu  |   |         |   | jumlah usulan Karpeg, Karis, Karsu yang terealisasi         | 100 kartu  |                       |                        |  |
| 5                                     | 03 | 02   | 2,04 | 08            | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                           | Kab.Tegal   | jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti/ diselesaikan | 47 kasus  | 42.700. | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Kab.Tegal   | jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti/ diselesaikan | 15 kasus              | 35.700.                |  |
|                                       |    |  |      |               |   | jumlah SK hukuman disiplin yang dikeluarkan         | 15 SK  |   |         |   |   | jumlah SK hukuman disiplin yang dikeluarkan                          | 11 SK                 |                        |  |
| 5                                     | 03 | 02   | 2,04 | 09            | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                                    | Kab.Tegal   | jumlah ijin perceraian yang diterbitkan                              | 40 ijin   | 6.000.  | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai          | Kab.Tegal   | jumlah ijin perceraian yang diterbitkan                              | 40 ijin               | 6.000.                 |  |
| <b>Rancangan Awal RKPD Tahun 2022</b> |    |  |      |               |   |   |  |   |         | <b>Hasil Analisis Kebutuhan</b>                   |   |  |                       |                        |  |
| <b>Kode</b>                           |    | <b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan</b> |      | <b>Lokasi</b> | <b>Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan</b>                 | <b>target Capaian</b>                               | <b>Pagu Indikatif (ribuan)</b>                                       | <b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan</b>      |         | <b>Lokasi</b>                                     | <b>Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan</b> | <b>target Capaian</b>  | <b>Kebutuhan Dana</b> | <b>Catatan penting</b> |  |
| <b>1</b>                              |    | <b>2</b>   |      | <b>3</b>      | <b>4</b>  | <b>5</b>  | <b>6</b>   | <b>7</b>  |         | <b>8</b>  | <b>9</b>  | <b>10</b>  | <b>11</b>             | <b>12</b>              |  |
| 5                                     | 04 |  |      |               | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  |   | 1.487.000.   | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  |         |   |   |  | 1.480.500.            |                        |  |
| 5                                     | 04 | 02   |      |               | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                    |   | 1.487.000.   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                    |         |   |   |  | 1.480.500.            |                        |  |
|                                       |    |  |      |               | Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun | 65,01 persen  |  | Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun |         |   | 65,01 persen  |  |                       |                        |  |



|                                       |          |  |          |               |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                       |                       |                        |
|---------------------------------------|----------|--|----------|---------------|---|---|--|---|--|---|---|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                       |          |  |          |               |   | Persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan | 37,10 persen   |   |  |   | Persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan | 37,10 persen   |   |                       |                       |                        |
| 5                                     | 04       | 02   | 2,01     |               |   | Pengembangan Kompetensi Teknis  |  | persentase PNS nonfungsional yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKD | 0,28 persen  | 187.000.  | Pengembangan Kompetensi Teknis  |  | persentase PNS nonfungsional yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKD | 0,28 persen           | 187.000.              |                        |
| 5                                     | 04       | 02   | 2,01     | 01            | Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | BKD Kab.Tegal   | jumlah dokumen rencana kebutuhan pengembangan kompetensi teknis umum | 1 dok.  | 5.000.   | Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | BKD Kab.Tegal   | jumlah dokumen rencana kebutuhan pengembangan kompetensi teknis umum | 1 dok.  | 5.000.                |                       |                        |
| <b>Rancangan Awal RKPd Tahun 2022</b> |          |  |          |               |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                       |                       |                        |
| <b>Hasil Analisis Kebutuhan</b>       |          |  |          |               |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                       |                       |                        |
| <b>Kode</b>                           |          | <b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan</b> |          | <b>Lokasi</b> | <b>Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan</b>   |   | <b>target Capaian</b>  | <b>Pagu Indikatif (ribuan)</b>  | <b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan</b> |   | <b>Lokasi</b>   | <b>Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan</b>          |   | <b>target Capaian</b> | <b>Kebutuhan Dana</b> | <b>Catatan penting</b> |
| <b>1</b>                              | <b>2</b> | <b>3</b>   | <b>4</b> | <b>5</b>      | <b>6</b>  | <b>7</b>  | <b>8</b>   | <b>9</b>  | <b>10</b>  | <b>11</b>   | <b>12</b>   |  |   |                       |                       |                        |
| 5                                     | 04       | 02   | 2,01     | 03            | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat  | Jateng, DIY   | jumlah ASN yang mengikuti pelatihan teknis                           | 1020 ASN  | 175.000.   | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan  | Jateng, DIY   | jumlah ASN yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKD            | 43 ASN  | 175.000.              |                       |                        |

|                                       |          |          |          |   |   |   |  |                                |   |   |   |  |                       |        |  |  |                        |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|---|---|---|--|--------------------------------|---|---|---|--|-----------------------|--------|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|
|                                       |          |          |          |   | Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum  |   | jumlah ASN yang mengikuti seminar/workshop                     | 1000 ASN                       |   | Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum  |   |  |                       |        |  |  |                        |  |  |  |  |  |
| 5                                     | 04       | 02       | 2,01     | 04  | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | BKD Kab.Tegal   | jumlah ASN yang dilakukan monitoring dan evaluasi pasca diklat | 20 PNS                         | 7.000.  | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | BKD Kab.Tegal   | jumlah ASN yang dilakukan monitoring dan evaluasi pasca diklat | 43 PNS                | 7.000. |  |  |                        |  |  |  |  |  |
| <b>Rancangan Awal RKPD Tahun 2022</b> |          |          |          |   |   |   |  |                                |   |   |   | <b>Hasil Analisis Kebutuhan</b>                                |                       |        |  |  | <b>Catatan penting</b> |  |  |  |  |  |
| <b>Kode</b>                           |          |          |          | <b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan</b>      | <b>Lokasi</b>   | <b>Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan</b> | <b>target Capaian</b>  | <b>Pagu Indikatif (ribuan)</b> | <b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan</b>      | <b>Lokasi</b>   | <b>Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan</b> | <b>target Capaian</b>  | <b>Kebutuhan Dana</b> |        |  |  |                        |  |  |  |  |  |
| <b>1</b>                              | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b>  | <b>6</b>  | <b>7</b>  | <b>8</b>   | <b>9</b>                       | <b>10</b>   | <b>11</b>   | <b>12</b>   |  |                       |        |  |  |                        |  |  |  |  |  |
| 5                                     | 04       | 02       | 2,02     | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional |   | persentase CPNS mengikuti pelatihan dasar                   | 60,61 persen   | 1.300.000.                     | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional |   | persentase CPNS mengikuti pelatihan dasar                   | 60,61 persen   | 1.293.500.            |        |  |  |                        |  |  |  |  |  |

|                                       |    |    |        |   |               |   |                             |                                |   |               |   |                             |                                 |                        |
|---------------------------------------|----|----|--------|---|---------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 5                                     | 04 | 02 | 2,0201 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional | BKD Kab.Tegal | jumlah dokumen rencana kebutuhan pengembangan kompetensi teknis diklat kepemimpinan, pelatihan dasar dan pelatihan fungsional   | 3 dok.                      | 10.000.                        | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional | BKD Kab.Tegal | jumlah dokumen rencana kebutuhan pengembangan kompetensi teknis diklat kepemimpinan, pelatihan dasar dan pelatihan fungsional   | 3 dok.                      | 10.000.                         |                        |
| 5                                     | 04 | 02 | 2,0207 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan   | Jateng, DIY   | jumlah ASN JF non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional<br>jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar/prajabatan<br>jumlah peserta pelatihan kepemimpinan | 15 PNS<br>80 CPNS<br>50 PNS | 1.275.000.                     | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan   | Jateng, DIY   | jumlah ASN JF non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional<br>jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar/prajabatan<br>jumlah peserta pelatihan kepemimpinan | 20 PNS<br>108 PNS<br>15 PNS | 1.268.500.                      |                        |
| <b>Rancangan Awal RPKD Tahun 2022</b> |    |    |        |   |               |   |                             |                                |   |               |   |                             | <b>Hasil Analisis Kebutuhan</b> |                        |
| <b>Kode</b>                           |    |    |        | <b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan</b>  | <b>Lokasi</b> | <b>Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan</b>   | <b>target Capaian</b>       | <b>Pagu Indikatif (ribuan)</b> | <b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan</b>  | <b>Lokasi</b> | <b>Indikator Kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan</b>   | <b>target Capaian</b>       | <b>Kebutuhan Dana</b>           | <b>Catatan penting</b> |
| <b>1</b>                              |    |    |        | <b>2</b>  | <b>3</b>      | <b>4</b>  | <b>5</b>                    | <b>6</b>                       | <b>7</b>  | <b>8</b>      | <b>9</b>  | <b>10</b>                   | <b>11</b>                       | <b>12</b>              |
| 5                                     | 04 | 02 | 2,0208 | Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan   | BKD Kab.Tegal | jumlah ASN yang dilakukan monitoring dan evaluasi pasca diklat kepemimpinan, pelatihan dasar dan  | 335 PNS                     | 15.000.                        | Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan   | BKD Kab.Tegal | jumlah ASN yang dilakukan monitoring dan evaluasi pasca diklat kepemimpinan, pelatihan dasar dan  | 143 PNS                     | 15.000.                         |                        |

|  |  |  |  |  |                      |  |  |            |  |                      |  |  |            |  |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|------------|--|----------------------|--|--|------------|--|
|  |  |  |  | Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | pelatihan fungsional |  |  |            | Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | pelatihan fungsional |  |  |            |  |
|  |  |  |  |  |                      |  |  | 5.435.245. |  |                      |  |  | 8.944.571. |  |

Hasil analisis kebutuhan rencana kerja BKD Kabupaten Tegal tahun 2022 dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan renstra tahun 2019-2024 pada tahun ketiga renstra agar tercapai target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Pagu anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program adalah sejumlah Rp 8.944.571.000,- (delapan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2022, pagu anggaran yang disediakan sejumlah Rp 5.435.245.100,- (lima milyar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah).

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini berasal dari usulan para pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah lain maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BKD Kabupaten Tegal sebagai OPD yang mempunyai kewenangan dibidang Kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan, tidak melayani masyarakat umum secara langsung, sehingga program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat tidak ada. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD adalah kegiatan-kegiatan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan mendukung kebijakan visi dan misi Bupati.

**Tabel 2.4. (Tabel T-C.32)**

**Usulan Program dan Kegiatan  
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**

| No  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/<br>Volume | Catatan |
|-----|------------------|--------|-------------------|--------------------|---------|
| (1) | (2)              | (3)    | (4)               | (5)                | (6)     |
| 1   | NIHIL            | NIHIL  | NIHIL             | NIHIL              | NIHIL   |
|     |                  |        |                   |                    |         |

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### BKD KABUPATEN TEGAL

##### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparatur negara memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan daerah.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, salah satunya adalah melalui reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas. Adanya pergeseran paradigma dalam mengelola kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, administrasi pembangunan, agenda pembangunan dan pelayanan publik yang inovatif menuntut hadirnya aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, netral, kreatif, inovatif, dan berdaya saing, serta didukung birokrasi yang lebih sederhana dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan.

Agenda ketujuh RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Setiap organisasi birokrasi dituntut memiliki akuntabilitas kinerja yang baik secara internal maupun kepada publik. Kondisi akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah saat ini masih sebatas pada pemenuhan pelaporan sehingga masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Akuntabilitas belum merepresentasikan kinerja riil institusi birokrasi pemerintah dengan baik dan efektif dalam mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan dan pelayanan publik. Untuk itu diperlukan suatu sistem manajemen kinerja kelembagaan yang efektif, handal, dan didukung dengan implementasi sistem integritas yang handal sebagai suatu bagian prasyarat untuk menuju *dynamic government*.

Keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh keberhasilan reformasi dibidang kepegawaian untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penataan sistem manajemen SDM aparatur. Sebagai instansi yang bertugas mengelola SDM aparatur di Kabupaten Tegal, BKD Kabupaten Tegal

berupaya melaksanakan program tersebut dengan memberikan prioritas terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung suksesnya pelaksanaan program nasional tersebut.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dituju melalui rencana kerja sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam perubahan rencana strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut :

#### **Tujuan :**

1. Meningkatkan tata kelola kepegawaian dan kualitas kinerja aparatur sipil negara.

#### **Sasaran :**

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dan penataan pegawai;
2. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur sipil negara;
3. Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah.

Sesuai dengan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024, Arah kebijakan Tahun 2022 adalah Peningkatan Penyelenggaraan/Pengiriman diklat, seminar/workshop/sejenis berbasis non klasikal. Hal ini selaras dengan visi dan misi Bupati Tegal dan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 yaitu meningkatkan nilai Indeks profesionalitas ASN. Selain itu dengan tugas pokok dan fungsi BKD sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah untuk mewujudkan ASN Pemerintah Kabupaten Tegal yang berkualitas dengan memiliki pengetahuan dan keahlian untuk melakukan tugas-tugas yang diembannya dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan serta target kinerja BKD yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BKD Tahun 2019-2024.

Selain itu juga dalam rangka merealisasikan indikator kinerja BKD sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu terkait dengan pencapaian misi pertama **"mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat"**.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka BKD menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah;  
dilaksanakan dalam rangka pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah, terdiri atas kegiatan yaitu :
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan subkegiatan :
    - 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
    - 2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
  - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan subkegiatan :
    - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
    - 2) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan subkegiatan :
    - 1) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan subkegiatan :
    - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
    - 2) Penyediaan peralatan dan dan perlengkapan kantor;
    - 3) Penyediaan bahan logistik kantor;
    - 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
    - 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
    - 6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
  - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan subkegiatan :
    - 1) Pengadaan mebelleir;
    - 2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
  - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan :
    - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;



- 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan :
  - 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
  - 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
  - 3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
2. Program kepegawaian daerah;
 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dibidang kepegawaian, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

  - a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, dengan subkegiatan :
    - 1) Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN;
    - 2) Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN;
    - 3) Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian;
    - 4) Pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
    - 5) Pengelolaan data kepegawaian;
  - b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, dengan subkegiatan :
    - 1) Pengelolaan mutasi ASN;
    - 2) Pengelolaan kenaikan angkat ASN;
    - 3) Pengelolaan promosi ASN;
  - c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, dengan subkegiatan :
    - 1) Pengelolaan assesment center;
    - 2) Pengelolaan pendidikan lanjutan;
    - 3) Sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN;
    - 4) Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional;
  - d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan subkegiatan :
    - 1) Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
    - 2) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
    - 3) Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
    - 4) Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai;
    - 5) Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai;
    - 6) Pembinaan disiplin PNS;
    - 7) Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN;
    - 8) Pelayanan proses izin perceraian pegawai.

3. Program pengembangan sumber daya manusia;

Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dibidang pendidikan dan pelatihan, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan pengembangan kompetensi teknis, dengan subkegiatan :
  - 1) Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
  - 2) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
  - 3) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan subkegiatan:
  - 1) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional;
  - 2) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;
  - 3) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1. Rencana Kerja

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal pada dasarnya merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis BKD tahun 2019-2024 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Rencana kerja juga merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Adapun visi Kabupaten Tegal yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”. Selain itu sebagai landasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022 yang telah direncanakan.

Dalam penyusunan Renja ini tetap mempertimbangkan beberapa hal, *pertama*, program kerja dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi BKD Kabupaten Tegal sebagai pengelola kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan. *Kedua*, adanya kesesuaian antara program kerja dan kegiatan yang direncanakan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. *Ketiga*, program kerja dan kegiatan yang direncanakan dirumuskan secara jelas dan terukur *output* dan *outcome*-nya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola berdasarkan prestasi kerja. *Keempat*, adanya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun sebelumnya.

Rencana kerja BKD tahun 2022 memuat informasi tentang sasaran yang akan dituju dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Rumusan rencana program, kegiatan dan subkegiatan BKD Kabupaten Tegal tahun 2022 dan Prakiraan Maju tahun 2023 adalah sebagaimana terlampir :

Tabel 4.1 (T-C.33)

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                       | Rencana Tahun 2022 |                            |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                               |
|------|---|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |   |  | Lokasi             | target Capaian             | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | target Capaian                    | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2   | 3  | 4                  | 5                          | 6                             | 7           | 8               | 9                                 | 10                            |
| 5    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |                    |                            |                               |             |                 |                                   |                               |
| 5    | 03 KEPEGAWAIAN  |  |                    |                            | 7.464.071                     |             |                 |                                   | 8.033.797                     |
| 5    | 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKD            |                    | 100,00 persen              | 4.716.059                     |             |                 | 100,00 persen                     | 1.148.757                     |
| 5    | 03 01 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang tersedia                         |                    | 30,00 persen               | 60.000                        |             |                 | 40,00 persen                      | 70.000                        |
| 5    | 03 01 2,01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | jumlah dokumen RTP SPIP<br>jumlah dokumen renja/perubahan renja<br>jumlah dokumen renja RB | BKD Kab.Tegal      | 5 dok.<br>5 dok.<br>5 dok. | 25.000                        | DAU         |                 | 5 dok.<br>5 dok.<br>5 dok.        | 30.000                        |
| 5    | 03 01 2,01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | jumlah dokumen pelaporan kinerja   | BKD Kab.Tegal      | 8 jenis                    | 35.000                        | DAU         |                 | 8 jenis                           | 40.000                        |
| 5    | 03 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | persentase pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya sesuai dengan peraturan           |                    | 100,00 persen              | 3.570.326                     |             |                 | 100,00 persen                     | 76.060                        |

| Kode |    |    |      |    | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Rencana Tahun 2022             |                      |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                               |
|------|----|----|------|----|---|--|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |      |    |   |  | Lokasi                         | target Capaian       | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | target Capaian                    | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |      |    | 2   | 3  | 4                              | 5                    | 6                             | 7           | 8               | 9                                 | 10                            |
| 5    | 03 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | gaji dan tunjangan ASN yang disediakan   | BKD Kab.Tegal                  | 14 bln               | 3.502.326                     | DAU         |                 | 14 bln                            | -                             |
| 5    | 03 | 01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan<br>jumlah pelaporan keuangan yang dibuat | BKD Kab.Tegal<br>BKD Kab.Tegal | 12 bln<br>8 jenis    | 68.000<br>-                   | DAU         |                 | 12 bln<br>8 jenis                 | 76.060                        |
| 5    | 03 | 01 | 2,05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>persentase ASN BKD yang mengikuti pelatihan/bimtek</b>                                      |                                | <b>100,00 persen</b> | <b>55.000</b>                 |             |                 | <b>100,00 persen</b>              | <b>50.000</b>                 |
| 5    | 03 | 01 | 2,05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | jumlah ASN BKD yang mengikuti pelatihan/bimtek   | Jateng, DIY                    | 55 ASN               | 55.000                        | DAU         |                 | 55 ASN                            | 50.000                        |
| 5    | 03 | 01 | 2,06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>persentase sarana administrasi umum yang tersedia</b>                                       |                                | <b>100,00 persen</b> | <b>250.220</b>                |             |                 | <b>100,00 persen</b>              | <b>252.856</b>                |
| 5    | 03 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor             | jumlah penerangan bangunan kantor  | BKD Kab.Tegal                  | 10 jenis             | 7.000                         | DAU         |                 | 10 jenis                          | 20.000                        |
| 5    | 03 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | jumlah ATK TIK yang dibeli<br>jumlah ATK yang dibeli   | Kab.Tegal                      | 9 jenis<br>54 jenis  | 63.850                        | DAU         |                 | 9 jenis<br>54 jenis               | 64.500                        |
| 5    | 03 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | jumlah bulan pegawai,tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan                                 | Kab.Tegal                      | 11 bln               | 35.810                        | DAU         |                 | 11 bln                            | 35.856                        |
| 5    | 03 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | jumlah barang cetakan  | Kab.Tegal                      | 8 jenis              | 20.000                        | DAU         |                 | 8 jenis                           | 20.000                        |
| 5    | 03 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | penyediaan bahan bacaan  | BKD Kab.Tegal                  | 2112 eks             | 10.560                        | DAU         |                 | 2112 eks                          | 12.500                        |

| Kode |    |    |      |    | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Rencana Tahun 2022 |   |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023   |                               |
|------|----|----|------|----|---|--|--------------------|---|-------------------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------------|
|      |    |    |      |    |   |  | Lokasi             | target Capaian  | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | target Capaian  | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |      |    | 2   | 3  | 4                  | 5   | 6                             | 7           | 8               | 9   | 10                            |
| 5    | 03 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi<br>jumlah rapat koordinasi bidang kepegawaian  | Jateng, DIY, DKI   | 11 bulan<br>1 keg.  | 113.000                       | DAU         |                 | 11 bulan<br>1 keg.  | 100.000                       |
| 5    | 03 | 01 | 2,07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>       | <b>persentase barang milik daerah yang tersedia</b>  |                    | <b>90,91</b> persen   | <b>181.263</b>                |             |                 | <b>96,97</b> persen   | <b>143.000</b>                |
| 5    | 03 | 01 | 2,07 | 05 | Pengadaan Mebel   | almari arsip besi<br>rak besi<br>kursi kerja<br>meja kerja<br>meja pelantikan  | BKD<br>Kab.Tegal   | 1 buah<br>5 buah<br>0 buah<br>0 buah<br>0 buah  | 15.563                        | DAU         |                 | 1 buah<br>5 buah<br>0 buah<br>0 buah<br>0 buah  | 10.000                        |
| 5    | 03 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | AC<br>CCTV<br>Conference cam webcam<br>CPU/Desktop<br>Handycam<br>Laptop<br>LCD projector<br>LED TV 55"<br>Mesin penghancur kertas<br>Perekam suara digital<br>Printer<br>screen projector | BKD<br>Kab.Tegal   | 5 buah<br>2 paket<br>1 buah<br>2 buah<br>2 buah<br>5 buah<br>1 buah<br>1 buah<br>1 buah<br>4 buah<br>2 buah<br>1 buah | 165.700                       | DAU         |                 | 5 buah<br>0 paket<br>1 buah<br>0 buah<br>0 buah<br>5 buah<br>1 buah<br>0 buah<br>0 buah<br>0 buah<br>5 buah<br>0 buah | 133.000                       |

| Kode |    |    |      |    | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Rencana Tahun 2022 |  |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                  |                               |
|------|----|----|------|----|--|--|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-----------------|--|-------------------------------|
|      |    |    |      |    |  |  | Lokasi             | target Capaian                                     | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | target Capaian                                     | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |      |    | 2  | 3  | 4                  | 5  | 6                             | 7           | 8               | 9  | 10                            |
| 5    | 03 | 01 | 2,08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | persentase jasa penunjang urusan yang terbayar   |                    | 100,00 persen                                      | 280.000                       |             |                 | 100,00 persen                                      | 220.000                       |
| 5    | 03 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | jasa komunikasi,sumber daya listrik dan air  | BKD Kab.Tegal      | 12 bulan   | 162.000                       | DAU         |                 | 12 bulan   | 145.000                       |
| 5    | 03 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | gedung kantor yang bersih dan terpelihara<br>jumlah pameran pembangunan yang diikuti   | BKD Kab.Tegal      | 12 bulan<br>1 paket                                | 118.000                       | DAU         |                 | 12 bulan<br>1 paket                                | 75.000                        |
| 5    | 03 | 01 | 2,09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | persentase barang milik daerah yang dipelihara   |                    | 90,00 persen                                       | 319.250                       |             |                 | 95,00 persen                                       | 336.841                       |
| 5    | 03 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah kendaraan dinas (mobil) yang dipelihara<br>jumlah kendaraan dinas (sepeda motor) yang dipelihara                                  | Kab.Tegal          | 6 unit<br>11 unit                                  | 175.000                       | DAU         |                 | 6 unit<br>11 unit                                  | 176.841                       |
| 5    | 03 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | AC yang dipelihara<br>CPU/Laptop yang dipelihara<br>LCD proyektor yang dipelihara<br>mebelair yang dipelihara<br>printer yang dipelihara | Kab.Tegal          | 19 unit<br>15 unit<br>3 unit<br>10 unit<br>11 unit | 44.250                        | DAU         |                 | 19 unit<br>15 unit<br>3 unit<br>10 unit<br>11 unit | 60.000                        |
| 5    | 03 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | jumlah gedung kantor yang dipelihara   | BKD Kab.Tegal      | 1 unit   | 100.000                       | DAU         |                 | 1 unit   | 100.000                       |

| Kode |    |    |      |    | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan          | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Rencana Tahun 2022 |  |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |                               |
|------|----|----|------|----|--|--|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-----------------|--|-------------------------------|
|      |    |    |      |    |  |  | Lokasi             | target Capaian   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | target Capaian   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |      |    | 2  | 3  | 4                  | 5  | 6                             | 7           | 8               | 9  | 10                            |
| 5    | 03 | 02 |      |    | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>  | Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan<br>Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya<br>Persentase jabatan fungsional terisi sesuai dengan kompetensinya<br>Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)<br>Rasio pegawai fungsional (%)<br>Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%)<br>tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan |                    | 0,12 persen<br>91,50 persen<br>38,79 persen<br>259,85 persen<br>15,28 persen<br>92,94 persen | 2.748.012                     |             |                 | 0,11 persen<br>95,42 persen<br>44,85 persen<br>288,10 persen<br>15,68 persen<br>92,69 persen | 6.885.040                     |
| 5    | 03 | 02 | 2,01 |    | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>                          | <b>persentase formasi CASN terisi</b>  |                    | 100,00 persen  | 1.376.812                     |             |                 | 100,00 persen  | 5.332.478                     |
| 5    | 03 | 02 | 2,01 | 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | jumlah dokumen rencana kebutuhan pegawai   | BKD Kab.Tegal      | 5 dok.   | 72.500                        | DAU         |                 | 5 dok.   | 87.375                        |
| 5    | 03 | 02 | 2,01 | 04 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN   | jumlah CASN<br>jumlah CPNS diangkat menjadi PNS  | Jateng, DIY, DKI   | 600 CASN<br>495 CPNS   | 725.812                       | DAU         |                 | 600 CASN<br>495 CPNS   | 4.560.103                     |



| Kode |    |    |      |    | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  | Rencana Tahun 2022 |  |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023               |                               |
|------|----|----|------|----|---|---|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------------|
|      |    |    |      |    |   |   | Lokasi             | target Capaian                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | target Capaian                                  | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |      |    | 2   | 3   | 4                  | 5  | 6                             | 7           | 8               | 9   | 10                            |
| 5    | 03 | 02 | 2,01 | 06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                             | jumlah SK pensiun (BUP, APS, janda/duda/anak)   | Jateng, DIY, DKI   | 650 SK   | 85.000                        | DAU         |                 | 674 SK  | 85.000                        |
| 5    | 03 | 02 | 2,01 | 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                      | jumlah komputer server baru<br>jumlah pegawai yang dikelola melalui SIMPEG<br>jumlah pembangunan/ pengembangan SIM<br>jumlah sistem informasi yang dipelihara | Jateng, DIY, DKI   | 1 unit<br>9420 ASN<br>3 aplikasi<br>8 aplikasi | 333.500                       | DAU         |                 | 1 unit<br>9700 ASN<br>2 aplikasi<br>10 aplikasi | 450.000                       |
| 5    | 03 | 02 | 2,01 | 11 | Pengelolaan Data Kepegawaian  | dokumen kepegawaian yang dipelihara<br>KIP yang dicetak<br>Latomap folder baru  | BKD Kab.Tegal      | 9550 ASN<br>1500 buah<br>1500 buah             | 160.000                       | DAU         |                 | 9700 ASN<br>1500 buah<br>500 buah               | 150.000                       |
| 5    | 03 | 02 | 2,02 |    | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>   | <b>persentase formasi JPT Pratama dan Jabatan Administrator (kepala SKPD/camat) yang terisi</b>   |                    | <b>96,30</b> persen                            | <b>698.500</b>                |             |                 | <b>98,15</b> persen                             | <b>700.000</b>                |
| 5    | 03 | 02 | 2,02 | 01 | Pengelolaan Mutasi ASN  | jumlah PNS Mutasi antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah   | Jateng, DIY, DKI   | 30 PNS   | 125.000                       | DAU         |                 | 30 PNS  | 274.932                       |
| 5    | 03 | 02 | 2,02 | 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  | jumlah SKKP<br>jumlah SPTKGB  | Jateng, DIY, DKI   | 1750 SK<br>750 SK                              | 141.500                       | DAU         |                 | 1500 SK<br>750 SK                               | 103.501                       |
| 5    | 03 | 02 | 2,02 | 03 | Pengelolaan Promosi ASN   | jumlah formasi JPT yang terisi  | Jateng, DIY, DKI   | 2 formasi                                      | 432.000                       | DAU         |                 | 7 formasi                                       | 321.567                       |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Rencana Tahun 2022 |                    |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                               |
|------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |   |  | Lokasi             | target Capaian     | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | target Capaian                    | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6                             | 7           | 8               | 9                                 | 10                            |
|      |   | jumlah pejabat fungsional baru non guru non kesehatan  |                    | 30 PNS             |                               |             |                 | 30 PNS                            |                               |
|      |   | jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, dan fungsional yang dilantik/dikukuhkan |                    | 355 PNS            |                               |             |                 | 355 PNS                           |                               |
|      |   | jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya melalui PCAP                                |                    | 10 PNS             |                               |             |                 | 10 PNS                            |                               |
|      |   | jumlah PNS yang promosi jabatan administrator dan pengawas                                       |                    | 30 PNS             |                               |             |                 | 30 PNS                            |                               |
| 5    | 03 02 2,03  | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>   |                    | <b>2,77</b> persen | <b>327.000</b>                |             |                 | <b>2,87</b> persen                | <b>395.062</b>                |
| 5    | 03 02 2,03 02   | Pengelolaan Assessment Center  | Kab.Tegal          | 100 PNS            | 194.800                       | DAU         |                 | 100 PNS                           | 300.000                       |
|      |   | jumlah ASN yang mengikuti SAP  |                    | 175 PNS            |                               |             |                 | 175 PNS                           |                               |
| 5    | 03 02 2,03 04   | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN  | Jateng, DIY        | 200 PNS            | 62.000                        | DAU         |                 | 200 PNS                           | 45.000                        |
|      |   | jumlah ASN mendapatkan SK tugas belajar dan ijin belajar   |                    | 100 PNS            |                               |             |                 | 100 PNS                           |                               |
|      |   | jumlah ASN mendapatkan surat penggunaan gelar  |                    | 300 PNS            |                               |             |                 | 300 PNS                           |                               |
|      |   | jumlah peserta ujian kedinasan (UDIN, UKPPI)   |                    |                    |                               |             |                 |                                   |                               |
| 5    | 03 02 2,03 12   | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN                                      | BKD Kab.Tegal      | 100 orang          | 24.700                        | DAU         |                 | 100 orang                         | 15.000                        |

| Kode |    |    |      |    | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  | Rencana Tahun 2022 |                                   |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                               |
|------|----|----|------|----|---|---|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |      |    |   |   | Lokasi             | target Capaian                    | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | target Capaian                    | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |      |    | 2   | 3   | 4                  | 5                                 | 6                             | 7           | 8               | 9                                 | 10                            |
| 5    | 03 | 02 | 2,03 | 14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional                        | jumlah ASN fungsional difasilitasi uji kompetensinya<br>jumlah ASN yang difasilitasi DUPAK  | Jateng, DKI        | 10 PNS<br>25 PNS                  | 45.500                        | DAU         |                 | 10 PNS<br>25 PNS                  | 35.062                        |
| 5    | 03 | 02 | 2,04 |    | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                                | <b>Persentase PNS yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya</b>  |                    | 80,00 persen                      | 345.700                       |             |                 | 80,00 persen                      | 457.500                       |
| 5    | 03 | 02 | 2,04 | 01 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                  | jumlah SKP Pegawai yang direviu   | BKD Kab.Tegal      | 9700 PNS                          | 64.000                        | DAU         |                 | 9700 PNS                          | 45.000                        |
| 5    | 03 | 02 | 2,04 | 02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                           | jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya  | BKD Kab.Tegal      | 9700 PNS                          | 10.000                        | DAU         |                 | 9700 PNS                          | 10.000                        |
| 5    | 03 | 02 | 2,04 | 03 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                        | jumlah pegawai yang dievaluasi kinerjanya<br>Jumlah pejabat yang melaporkan LHKPN<br>jumlah usulan Karpeg, Karis, Karsu yang terealisasi            | BKD Kab.Tegal      | 9700 PNS<br>107 peg.<br>300 kartu | 23.000                        | DAU         |                 | 9700 PNS<br>107 peg.<br>300 kartu | 65.000                        |
| 5    | 03 | 02 | 2,04 | 04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai                                | jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan /plakat<br>Jumlah PNS sakit menahun yang diperiksa kesehatannya<br>Jumlah PNS yang difasilitasi JKK dan JKM | BKD Kab.Tegal      | 412 PNS<br>10 PNS<br>5 orang      | 151.000                       | DAU         |                 | 412 PNS<br>10 PNS<br>5 orang      | 180.000                       |
| 5    | 03 | 02 | 2,04 | 05 | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai   | jumlah ASN yang mendapatkan SLKS  | BKD Kab.Tegal      | 150 ASN                           | 6.000                         | DAU         |                 | 200 ASN                           | 7.500                         |

| Kode |    |    |      |    | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Rencana Tahun 2022 |                                   |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023  |                               |
|------|----|----|------|----|---|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |      |    |   |  | Lokasi             | target Capaian                    | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | target Capaian                     | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |      |    | 2   | 3  | 4                  | 5                                 | 6                             | 7           | 8               | 9                                  | 10                            |
| 5    | 03 | 02 | 2,04 | 07 | Pembinaan Disiplin ASN  | jumlah ASN mendapatkan pembinaan disiplin<br>jumlah OPD/UPTD yang disidak disiplin PNS<br>jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Per-UU | Kab.Tegal          | 100 ASN<br>30 OPD/ins<br>1500 PNS | 50.000                        | DAU         |                 | 100 ASN<br>30 OPD/inst<br>1500 PNS | 80.000                        |
| 5    | 03 | 02 | 2,04 | 08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                             | jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti/ diselesaikan<br>jumlah SK hukuman disiplin yang dikeluarkan                    | Kab.Tegal          | 15 kasus<br>11 SK                 | 35.700                        | DAU         |                 | 15 kasus<br>11 SK                  | 60.000                        |
| 5    | 03 | 02 | 2,04 | 09 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                                      | jumlah ijj perceraian yang diterbitkan   | Kab.Tegal          | 40 ijin                           | 6.000                         | DAU         |                 | 40 ijin                            | 10.000                        |
| 5    | 04 |    |      |    | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>   |  |                    |                                   | <b>1.480.500</b>              |             |                 |                                    | <b>2.355.146</b>              |
| 5    | 04 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                               |  |                    |                                   | <b>1.480.500</b>              |             |                 |                                    | <b>2.355.146</b>              |
|      |    |    |      |    |   | Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun  |                    | 70,00 persen                      |                               |             |                 | 65,01 persen                       |                               |
|      |    |    |      |    |   | Persentase PNS mengikuti seminar/ workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan   |                    | 40,00 persen                      |                               |             |                 | 37,10 persen                       |                               |
| 5    | 04 | 02 | 2,01 |    | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>   | <b>persentase PNS nonfungsional yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKD</b>   |                    | <b>2,19</b> persen                | <b>187.000</b>                |             |                 | <b>6,82</b> persen                 | <b>240.000</b>                |

| Kode |    |    |      |    | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                 | Rencana Tahun 2022 |                     |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                               |
|------|----|----|------|----|---|--|--------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |      |    |   |  | Lokasi             | target Capaian      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | target Capaian                    | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |      |    | 2   | 3  | 4                  | 5                   | 6                             | 7           | 8               | 9                                 | 10                            |
| 5    | 04 | 02 | 2,01 | 01 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                     | jumlah dokumen rencana kebutuhan pengembangan kompetensi teknis umum | BKD Kab.Tegal      | 1 dok.              | 5.000                         | DAU         |                 | 1 dok.                            | 5.000                         |
| 5    | 04 | 02 | 2,01 | 03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum   | jumlah ASN yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKD            | Jateng, DIY        | 43 ASN              | 175.000                       | DAU         |                 | 100 ASN                           | 225.000                       |
| 5    | 04 | 02 | 2,01 | 04 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | jumlah ASN yang dilakukan monitoring dan evaluasi pasca diklat       | BKD Kab.Tegal      | 43 PNS              | 7.000                         | DAU         |                 | 100 PNS                           | 10.000                        |
| 5    | 04 | 02 | 2,02 |    | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>  | <b>persentase CPNS mengikuti pelatihan dasar</b>                     |                    | <b>60,61</b> persen | <b>1.293.500</b>              |             |                 | <b>100,00</b> persen              | <b>2.115.146</b>              |

| Kode |    |    |      |    | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  | Rencana Tahun 2022 |                             |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                               |
|------|----|----|------|----|--|---|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |      |    |  |   | Lokasi             | target Capaian              | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | target Capaian                    | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |      |    | 2  | 3   | 4                  | 5                           | 6                             | 7           | 8               | 9                                 | 10                            |
| 5    | 04 | 02 | 2,02 | 01 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional  | jumlah dokumen rencana kebutuhan pengembangan kompetensi teknis diklat kepemimpinan, pelatihan dasar dan pelatihan fungsional   | BKD Kab.Tegal      | 3 dok.                      | 10.000                        | DAU         |                 | 3 dok.                            | 10.000                        |
| 5    | 04 | 02 | 2,02 | 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan  | jumlah ASN JF non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional<br>jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar/prajabatan<br>jumlah peserta pelatihan kepemimpinan | Jateng, DIY        | 20 PNS<br>108 PNS<br>15 PNS | 1.268.500                     | DAU         |                 | 20 PNS<br>382 PNS<br>15 PNS       | 2.086.646                     |
| 5    | 04 | 02 | 2,02 | 08 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | jumlah ASN yang dilakukan monitoring dan evaluasi pasca diklat kepemimpinan, pelatihan dasar dan pelatihan fungsional   | BKD Kab.Tegal      | 143 PNS                     | 15.000                        | DAU         |                 | 417 PNS                           | 18.500                        |
|      |    |    |      |    |  |   |                    |                             | 8.944.571                     |             |                 |                                   | 10.388.943                    |

## 4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Program BKD Kabupaten Tegal merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKD. Rencana program prioritas beserta indikator program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BKD. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun 2022 adalah sebagaimana **tabel 4.2** berikut.

**Tabel 4.2**  
**Pendanaan Perangkat Daerah**

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |  |   | APBD<br>Kab.Tegal |  |
|------|---|--|---|-------------------|--|
| 1    | 2   |  |   | 3                 |  |
|      | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                  |  |   |                   |  |
|      | <b>KEPEGAWAIAN</b>  |  |   |                   |  |
|      | <b>I.</b>   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota</b> |   |                   |  |
|      | 1   | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Aparatur            |   | <b>60.000.000</b> |  |
|      | 1   | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 25.000.000        |  |
|      | 1   | 2  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 35.000.000        |  |
|      | 2   | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                         |   | <b>35.000.000</b> |  |
|      | 2   | 3  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 3.502.326.000     |  |
|      | 2   | 4  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                     | 68.000.000        |  |

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |  | APBD Kab.Tegal       |
|------|---|---|--|----------------------|
|      | 3   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |  | <b>55.000.000</b>    |
|      | 3   | 5   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | 55.000.000           |
|      | 4   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |  | <b>250.220.000</b>   |
|      | 4   | 6   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  | 7.000.000            |
|      | 4   | 7   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 63.850.000           |
|      | 4   | 8   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 35.810.000           |
|      | 4   | 9   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 20.000.000           |
|      | 4   | 10  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | 10.560.000           |
|      | 4   | 11  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 113.000.000          |
|      | 5   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |  | <b>181.263.000</b>   |
|      | 5   | 12  | Pengadaan Mebel  | 15.563.000           |
|      | 5   | 13  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 165.700.000          |
|      | 6   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  | <b>280.000.000</b>   |
|      | 6   | 14  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 162.000.000          |
|      | 6   | 15  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 118.000.000          |
|      | 7   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | <b>319.250.000</b>   |
|      | 7   | 16  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 44.250.000           |
|      | 7   | 17  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 100.000.000          |
|      | <b>II.</b>  | <b>Program Kepegawaian Daerah</b>                                     |  | <b>2.748.012.000</b> |
|      | 8   | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                |  | <b>1.376.812.000</b> |
|      | 8   | 18  | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                             | 72.500.000           |
|      | 8   | 19  | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN   | 725.812.000          |
|      | 8   | 20  | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi pemberhentian  | 85.000.000           |
|      | 8   | 21  | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 333.500.000          |
|      | 8   | 22  | Pengelolaan Data Kepegawaian   | 160.000.000          |



| <b>KODE</b> | <b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b> |   |   | <b>APBD Kab.Tegal</b> |
|-------------|--|---|---|-----------------------|
|             | 9  |   | Mutasi dan Promosi ASN  | <b>698.500.000</b>    |
|             | 9  | 23  | Pengelolaan Mutasi ASN  | 125.000.000           |
|             | 9  | 24  | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  | 141.500.000           |
|             | 9  | 25  | Pengelolaan Promosi ASN   | 432.000.000           |
|             | 10   |   | Pengembangan Kompetensi ASN   | <b>327.000.000</b>    |
|             | 10   | 26  | Pengelolaan Assessment Center   | 194.800.000           |
|             | 10   | 27  | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN   | 62.000.000            |
|             | 10   | 28  | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN   | 24.700.000            |
|             | 10   | 29  | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional  | 45.500.000            |
|             | 11   |   | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur   | <b>345.700.000</b>    |
|             | 11   | 30  | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  | 64.000.000            |
|             | 11   | 31  | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur   | 10.000.000            |
|             | 11   | 32  | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  | 23.000.000            |
|             | 11   | 33  | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai  | 151.000.000           |
|             | 11   | 34  | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai   | 6.000.000             |
|             | 11   | 35  | Pembinaan Disiplin ASN  | 50.000.000            |
|             | 11   | 36  | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN   | 35.700.000            |
|             | 11   | 37  | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai  | 6.000.000             |
|             |  |   |   |                       |
|             | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>  |   |   |                       |
|             | <b>III.</b>  | <b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b> |   |                       |
|             | 12   |   | Pengembangan Kompetensi Teknis  | <b>187.000.000</b>    |
|             | 12   | 38  | Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 5.000.000             |
|             | 12   | 39  | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                         | 175.000.000           |

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan |    |  | APBD<br>Kab.Tegal    |
|------|--|----|--|----------------------|
|      | 12   | 40 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum  | 7.000.000            |
|      | 13   |    | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional  | <b>1.293.500.000</b> |
|      | 13   | 41 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional                                       | 10.000.000           |
|      | 13   | 42 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan  | 1.268.500.000        |
|      | 13   | 43 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 15.000.000           |
|      |  |    |  | <b>8.944.571.000</b> |

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan tahunan yang memuat berbagai kegiatan tahun anggaran 2022 dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah yang tercantum dalam Renstra BKD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024. Program dan kegiatan dirumuskan secara konkrit, disertai dengan rencana capaian program dan kegiatan yang memuat indikator *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur sehingga pencapaian tujuan dan sasaran akan dapat berjalan secara efektif.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penyusunan Renja dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Harapan kami Renja ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan tugas bagi segenap ASN pada BKD Kabupaten Tegal. Dengan mempedomani Renja, akan dapat diketahui secara pasti apa yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Slawi,      September 2021

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**

**SEKRETARIS**



**MUHAJIDIN, SH. MH**

*Pembina Tingkat I*

NIP. 19690619 199003 1 003

